



**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH
MINIMUM, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA
TIMUR**

SKRIPSI

Oleh :
Ody Reza
NIM 130810101082

**PROGAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH
MINIMUM, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA
TIMUR**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

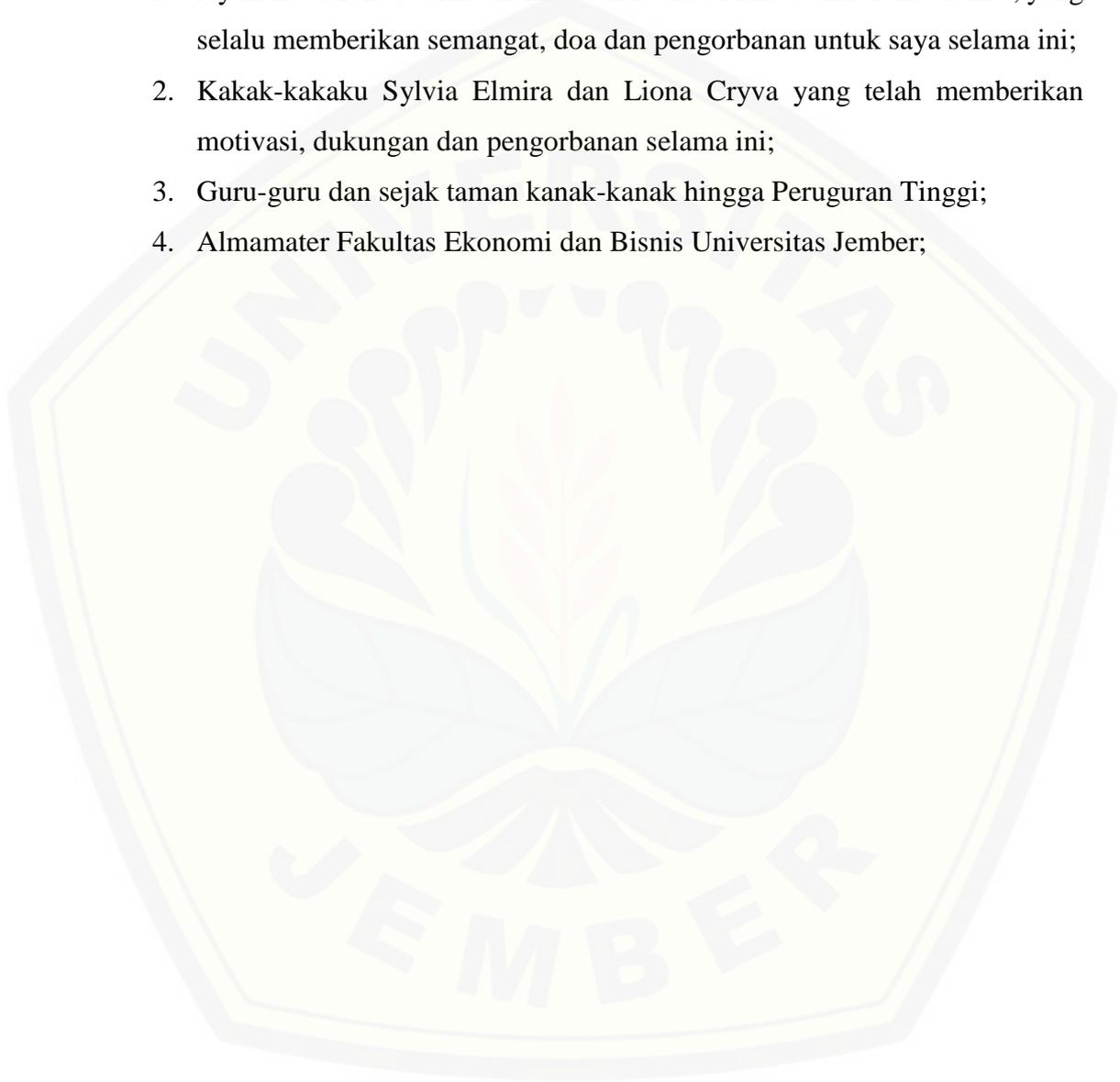
Oleh :
Ody Reza
NIM 130810101082

**PROGAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga pada ALLAH SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Moh. Taufik Chemad dan Ibunda Fitria Sukristiani tercinta, yang selalu memberikan semangat, doa dan pengorbanan untuk saya selama ini;
2. Kakak-kakaku Sylvia Elmira dan Liona Cryva yang telah memberikan motivasi, dukungan dan pengorbanan selama ini;
3. Guru-guru dan sejak taman kanak-kanak hingga Peruguran Tinggi;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;



MOTTO

"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya"
(Ali Bin Abi Thalib)

"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak."
(Aldus Huxley)

"Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum."

(Mahatma Gandhi)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ody Reza

NIM : 130810101082

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 April 2018

Yang menyatakan,

Ody Reza

NIM 130810101082

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH
MINIMUM, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA
TIMUR**

Oleh :

Ody Reza
NIM 130810101082

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Petrus Edi Suswandi, M.P

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Regina Niken Wilantari, S.E, M.Si

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur.

Nama Mahasiswa : Ody Reza

NIM : 13081010182

Fakultas : Ekonomi dan bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan : 12 April 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Petrus Edi Suswandi, M.P
NIP. 1955 0425 198503 1 001

Dr. Regina Niken Wilantari, S.E, M.Si
NIP. 1974 0913 200112 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes
NIP. 1964 1108 198902 2 001

**PENGESAHAN
Judul Skripsi**

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH
MINIMUM, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ody Reza

Nim : 130810101082

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

11 MEI 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Moehammad Fathorrazi, SE., M. Si (.....)
NIP 19630614 199002 1 001
2. Sekertaris : Dr. Rafael Purtomo S., SE., M.Si (.....)
NIP 19581024 198803 1 001
3. Anggota : Drs. Badjuri, ME (.....)
NIP 19531225 198403 1 002

Foto 4 X 6
warna

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP. 19710727 199512 1 001

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Ody Reza

*Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Dan juga melihat variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap tingkat kemiskinan. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan data panel, jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka tahun 2012-2015. Hasil analisa data dengan regresi linier berganda diperoleh hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Dan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap kemiskinan adalah pengangguran.

Kata kunci: Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka

Analysis Effect Growth Economics, Wages Minimum, and Open Unemployment Rate Towards Poverty Rate in Province East Java

Ody Reza

*Department of Development Economics, Faculty of Economics and Bussines,
University of Jember*

ABSTRACT

The main objectives of the economic development effort besides creating the highest growth, should also eliminate or reduce the poverty rate, income gap, and open unemployment rate. Poverty in Indonesia is caused by various factors, namely the level of wages are still below the standard, high unemployment rate, and slow economic growth. The purpose of this research is to know the effect of economic growth, minimum wage, and open unemployment rate to poverty in East Java. And also see the variables that have the most dominant effect on poverty level. The method used is multiple linear regression using the classical assumption test (Ordinary Least Square) using panel data, the type of data used is secondary data covering economic growth, minimum wage and open unemployment rate in 2012-2015. The result of data analysis with multiple linear regression obtained result from research indicate that economic growth and minimum wage have negative and significant effect to poverty in East Java while unemployment have positive and significant influence to poverty level in East Java. And the most dominant variable affecting poverty is unemployment.

Keyword: *Poverty Rate, Growth Economics, Wages Minimum, Open Unemployment Rate*

RINGKASAN

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur; Ody Reza, 130810101082; 2018; 115 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember.

Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Sehingga dapat dikatakan bahwa prioritas dari pembangunan adalah menghapuskan kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Dan juga melihat variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap tingkat kemiskinan. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan data panel.

Hasil estimasi regresi linier berganda, secara bersama-sama (uji F) terdapat pengaruh signifikan dari variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran terhadap kemiskinan dengan probabilitas F-statistik 0,000000. Hasil analisis secara parsial (uji t) diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan pada taraf $\alpha = 0,05$ terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000, variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada taraf $\alpha = 0,05$ terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0351 variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan taraf $\alpha = 0,05$ terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Hasil koefisien determinasi (*Adjusted R-square*)

sebesar 0.993195, dengan demikian dapat diartikan bahwa total variasi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan oleh variabel independen pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pengangguran sebesar 99,3195 persen sedangkan sisanya 0,6805 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Dan pengangguran menjadi variabel yang paling dominan terhadap tingkat kemiskinan.



PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmatNya, karena tanpaNya tidak ada suatu hajatpun yang dapat terlaksana. Skripsi yang penulis ajukan merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

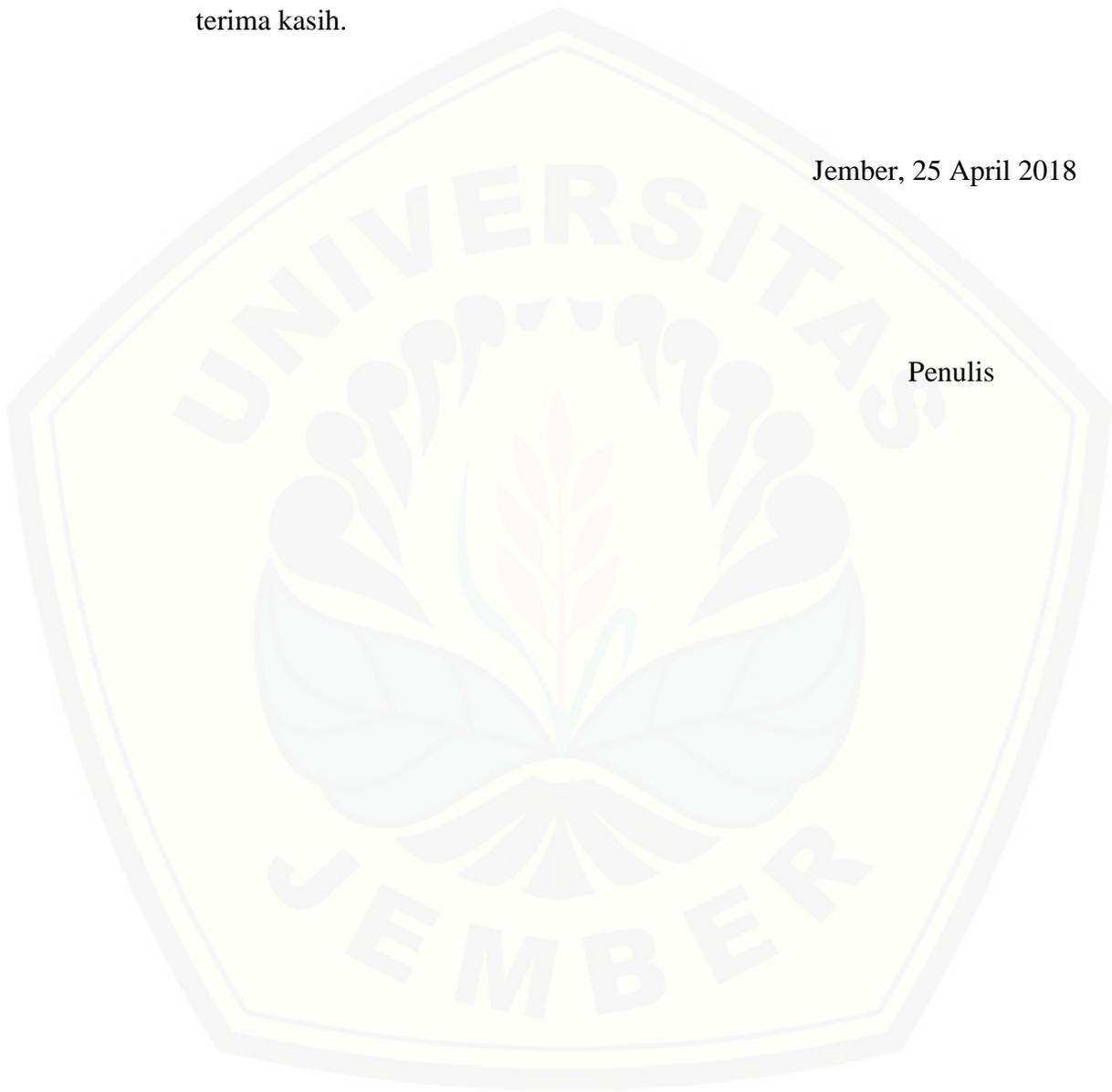
Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang amat besar kepada ;

1. Bapak Drs. Petrus Edi Suswandi, M.P , selaku pembimbing I dan ibu Dr. Regina Niken Wilantari, S.E.,M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan dan saran yang sangat berguna/berarti bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Lilis Yuliati., SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Seketaris Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah membimbing penulis selam menjadi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Sebastiana Viphindratin, M.Kes selaku Ketua Jurusan IESP Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak, CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Para dosen penguji penulis, yang telah memberikan arahan, masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya selama kurang lebih 5 (lima) tahun perkuliahan.
7. Ayahanda Moh Taufik Chemad dan Ibunda Fitria Sukristiani tersayang, atas curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang tiada henti yang sangat besar dan tak ternilai harganya bagi saya dan atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT akan membalasnya.

8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Jember, 25 April 2018

Penulis



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN SAMPUL..... | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN MOTO..... | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | v |
| HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI | vi |
| HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| <i>ABSTRACT</i> | xi |
| RINGKASAN | xi |
| PRAKATA..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1 Landasan Teori | 8 |
| 2.1.1 Konsep Kemiskinan | 8 |
| 2.1.2 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan | 9 |
| 2.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi | 11 |
| 2.1.4 Teori Pertumbuhan Neo-Klasik..... | 12 |
| 2.1.5 Teori Upah | 15 |
| 2.1.6 Upah Minimum | 16 |
| 2.1.6.1 Teori Upah Substansi | 18 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1.7 Pengangguran | 20 |
| 2.1.7.1 Teori Keynes | 21 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 23 |
| 2.3 Kerangka Konseptual | 25 |
| 2.4 Hipotesis Penelitian..... | 26 |
| BAB 3. MEODE PENELITIAN | 27 |
| 3.1 Rancangan Penelitian | 27 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data | 27 |
| 3.3 Metode Analisis Data..... | 27 |
| 3.3.1 Analisis Regresi Data Panel..... | 29 |
| 3.3.2 <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)..... | 31 |
| 3.3.3 <i>Random Effect Model</i> (REM) | 31 |
| 3.4 Uji Penentuan Model | 31 |
| 3.4.1 Uji Chow | 31 |
| 3.4.2 Uji Hausman | 32 |
| 3.5 Uji Statistik | 32 |
| 3.5.1 Uji F | 32 |
| 3.5.2 Uji T..... | 33 |
| 3.5.3 Koefisiaen Determinasi(R^2) | 33 |
| 3.6 Uji Asumsi Klasik | 34 |
| 3.6.1 Uji Multikolienaritas | 34 |
| 3.6.2 Uji Heterokedastisitas | 35 |
| 3.6.3 Uji Autokorelasi | 36 |
| 3.7 Definisi Operasional | 37 |
| 3.7.1 Variabel Terikat | 38 |
| 3.7.2 Variabel Bebas | 39 |
| BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN | 42 |
| 4.1 Gambaran Umum | 42 |
| 4.1.1 Keadaan Geografis Provinsi Jawa Timur..... | 42 |
| 4.1.2 Tingkat Penduduk Miskin pada Jawa Timur | 42 |
| 4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi pada Jawa Timur | 46 |

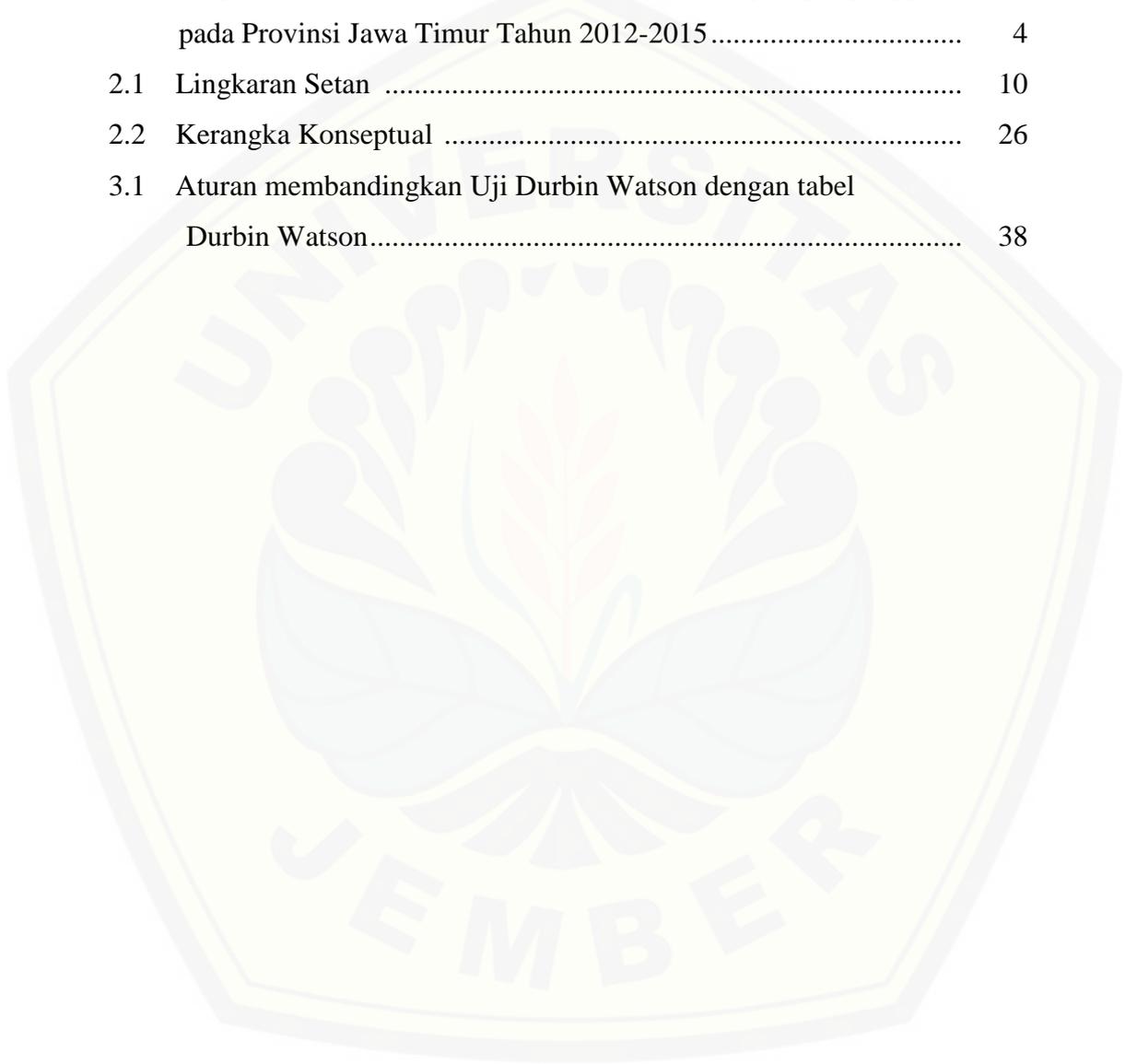
| | |
|--|-----------|
| 4.1.4 Upah Minimum pada Jawa Timur | 49 |
| 4.1.5 Tingkat Penganggura Terbuka pada Jawa Timur | 51 |
| 4.2 Analisis Data | 54 |
| 4.2.1 Statistik Deskriptif | 54 |
| 4.2.2 Analisa Hasil Estimasi dengan Panel Data | 55 |
| 4.2.3 Model Terbaik <i>Fixed Effect Model</i> | 57 |
| 4.2.4 Uji Kesesuaian | 58 |
| 4.2.5 Uji Asumsi Klasik | 61 |
| 4.2.6 Hasil Individual Effect | 64 |
| 4.3 Pembahasan | 67 |
| 4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskiskinan | 67 |
| 4.3.2 Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan | 69 |
| 4.3.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat kemiskinan | 70 |
| BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN | 72 |
| 5.1 Kesimpulan | 72 |
| 5.2 Keterbatasan | 74 |
| 5.3 Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| LAMPIRAN..... | 80 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1.1 Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2012 – 2015 (ribuan jiwa) | 2 |
| 2.1 Peneliti Terdahulu | 23 |
| 3.1 Uji Statistik Durbin-Watson..... | 38 |
| 4.1 Tingkat Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur | 42 |
| 4.1.1 Kebutuhan Hidup Minimum dan Upah Minimum Kabupaten Sampang 2007 -2015 (Rp) | 44 |
| 4.2 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur | 45 |
| 4.3 Upah Minimum di Provinsi Jawa Timur..... | 49 |
| 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur..... | 51 |
| 4.5 Statistik Deskriptif | 54 |
| 4.6 Uji Chow | 55 |
| 4.7 Uji Hausman | 56 |
| 4.8 <i>Fix Effect Model</i> (FEM)..... | 57 |
| 4.9 Uji t-statistik | 61 |
| 4.10 Uji Multikoleniaritas | 62 |
| 4.11 Uji Heterokedastisitas | 63 |
| 4.12 Uji Autokorelasi | 64 |
| 4.13 Estimasi Individual Effect pada Fixed Effect Model di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 | 64 |
| 4.14 Tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan Tingkat pengangguran terbuka di kota Madiun, Mojokerto, dan Blitar | 67 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 1 1 Jumlah Penduduk Miskin pada Provinsi di Indonesia Tahun 2015 | 3 |
| 1.2 Tingkat kemiskinan, Petumbuhan Ekonomi, Tingkat pengangguran pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 | 4 |
| 2.1 Lingkaran Setan | 10 |
| 2.2 Kerangka Konseptual | 26 |
| 3.1 Aturan membandingkan Uji Durbin Watson dengan tabel Durbin Watson..... | 38 |



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Todaro, 2000:20). Sehingga dapat dikatakan bahwa prioritas dari pembangunan adalah menghapuskan kemiskinan.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Mudrajad Kuncoro, 1997:102-103). Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan ukuran pendapatan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Menurut Todaro menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri (Todaro,1995:37).

Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. seseorang dikatakan miskin bila dia belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan. Menurut (M. Kuncoro dalam Ravi Dwi, 2010: 33) semua ukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen yaitu, (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi

minimum dan kebutuhan mendasar lainnya; dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Ravi Dwijayanto 2010:17). Bagian pertama relatif jelas. Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat harga-harga makanan yang menjadi menu makanan golongan kaum miskin.

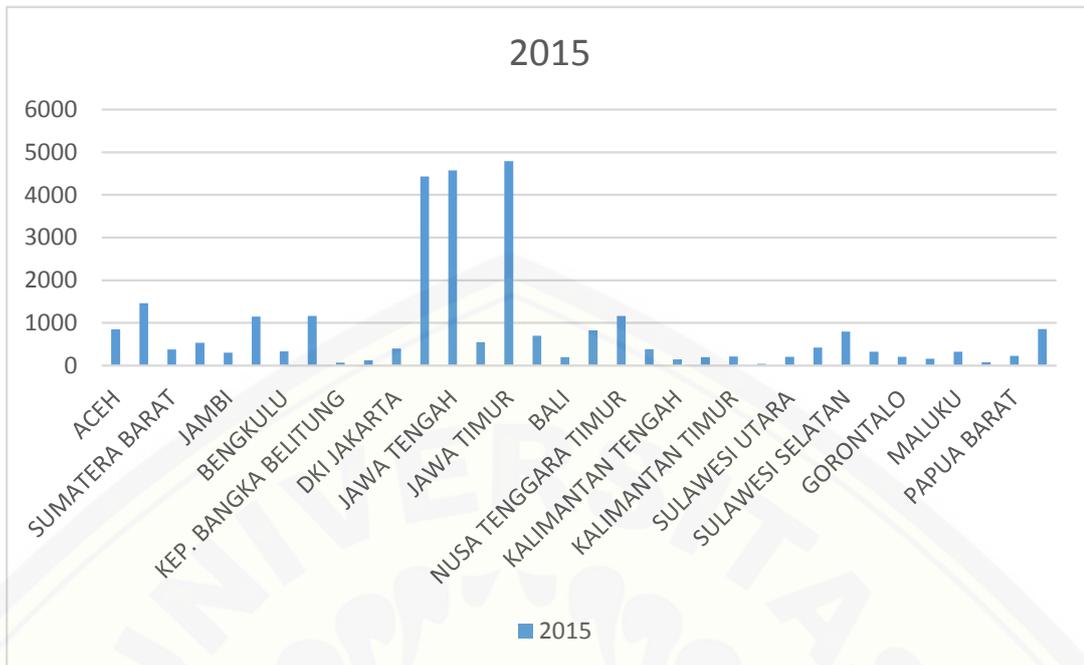
Tabel 1.1 Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2012 – 2015

| Tahun | Jumlah penduduk miskin (ribuan jiwa) |
|-------|--------------------------------------|
| 2012 | 29132.40 |
| 2013 | 28066.60 |
| 2014 | 28280.01 |
| 2015 | 28592.79 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia pada tahun 2012 Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 29132,40 ribu jiwa. Menurun pada tahun 2013 menjadi 28066,60, terus meningkat hingga tahun 2015 menjadi 28592,79 ribu jiwa. Dengan total jumlah penduduk sebesar 258,2 juta jiwa pada tahun 2015, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi (BPS, 2012).

Meskipun pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menempati peringkat pertama sebesar 7,22% melebihi Pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,5% namun provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin terbesar peringkat ke tiga sebesar 14,23 % , dengan proporsi penduduk miskin kota sebesar 1.768.230.000 jiwa dan penduduk desa sebesar 3.587.980.000 jiwa, sehingga total penduduk miskin Jawa Timur sebesar 5 356.210.000 jiwa atau sebesar 14,23%. (Soejoto dan Karisma, 2013:2). Dan pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia berada pada provinsi Jawa Timur



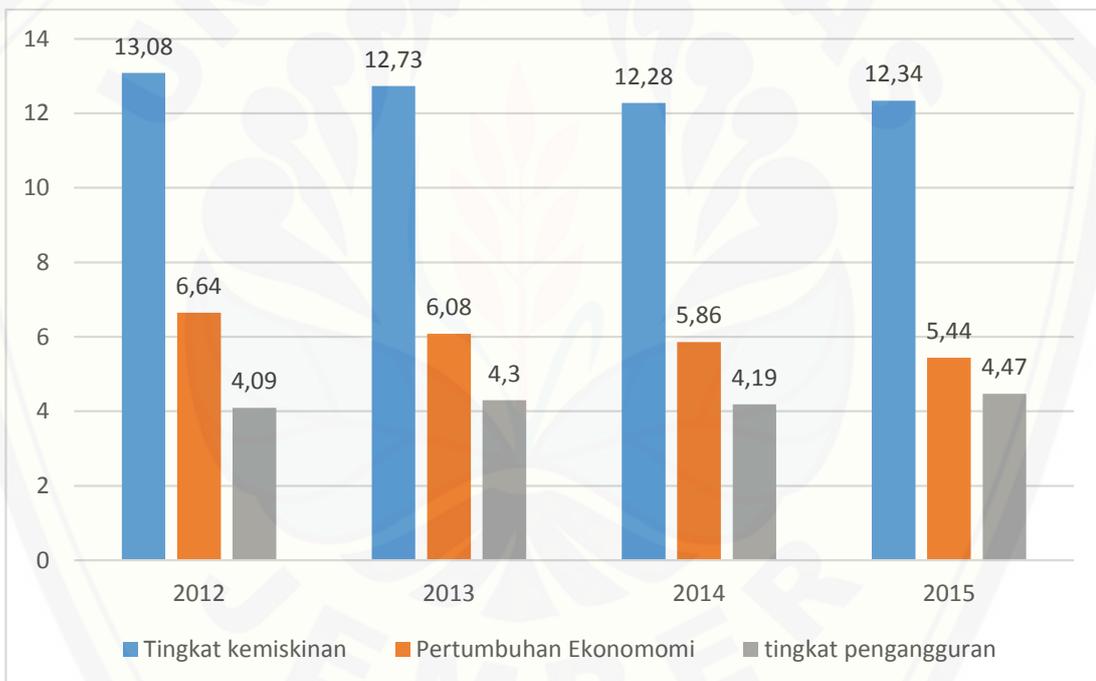
Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin pada Provinsi di Indonesia Tahun 2015 (Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018)

Pada gambar 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin pada provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2015. Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak berada pada provinsi Jawa Timur. Dengan jumlah sebesar 4782,12 ribu jiwa, kemudian Pada Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah sebesar 4577,04 ribu jiwa. Dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 28592.79 ribu jiwa, Provinsi Jawa Timur menjadi Provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia.

Berdasarkan penelitian Karnaji (2011: 5-7) kendati kegiatan pembangunan dan perkembangan perekonomian selama ini telah melahirkan berbagai kemajuan di Jawa Timur, tetapi akibat distribusi hasil-hasil pembangunan berjalan kurang merata dan bahkan hanya mengumpul di pusat-pusat pertumbuhan seperti di kota-kota besar akhirnya terjadi kesenjangan antar kelas dan golongan. Kesenjangan itu dapat dilihat, antara lain dalam perbedaan perkembangan struktur perekonomian di masing-masing daerah, tingkat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), ketersediaan prasarana dan sarana dasar, dan akses masing-masing wilayah pada pusat-pusat kekuasaan dan produksi.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai keterkaitan yang erat, Pertumbuhan ekonomi sering kali dijadikan tolak ukur kinerja perekonomian suatu wilayah, akan tetapi belum pasti tingginya pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingginya juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berarti bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008:38), pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan.



Gambar 1.2 Tingkat kemiskinan, Petumbuhan Ekonomi, Tingkat pengangguran pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018)

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama tahun 2012-2015 menunjukkan tingkat pertumbuhan yang relatif menurun pada tahun 2012 menunjukkan angka 6,64 persen dan pada tahun 2013 mengalami

penurunan menjadi 6,08, kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan pertumbuhan menjadi 5,58, pada tahun 2015 mengalami penurunan yang dilihat cukup tinggi menjadi 5,44. penduduk miskin di Jawa Timur memang mengalami penurunan pada 3 tahun yaitu 2012, 2013, 2014 namun meningkat kembali pada tahun 2015. Kita bisa melihat pada tahun 2012 Jawa Timur memiliki tingkat kemiskinan sebesar 13,08 persen kemudian menurun pada tahun 2013 menjadi 12,73 persen dan pada tahun 2014 menurun kembali menjadi 12,28 persen, namun pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 12,34 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat penduduk miskin di Jawa Timur masih tidak stabil.

Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Jika masyarakat tidak menganggur dan memiliki penghasilan, penghasilan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan mereka untuk hidup. Jika kebutuhan hidupnya telah terpenuhi, sehingga tidak akan miskin, dan diharapkan tingkat pengangguran menjadi rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan pun akan semakin rendah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat. Bahkan, masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah-masalah baru di bidang ekonomi maupun non ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan (Kristanto, 2014:9). Menurut Sumarsono (2009): "Tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja ataupun labour force terdiri dari (1) golongan yang bekerja, dan (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan" (Yarlina Yacob, 2012).

Tingkat pengangguran di Jawa Timur tergolong masih tinggi, dimana terjadi tingkat pengangguran yang cukup tinggi pada tahun 2015 yang sebelumnya sebesar 4,19 persen pada tahun 2014 meningkat sebesar 0,28 persen menjadi 4,47 persen pada tahun 2015 (Gambar 1.2)

Selain pertumbuhan ekonomi, kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor

: Per-01/Men/1999, Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Jika kebutuhan hidup minimum dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkat dan terbebas dari masalah kemiskinan.

Salah satu aspek penting untuk melihat kinerja pembangunan selain Upah Minimum adalah efektivitas penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang/jasa yang dihasilkan meningkat. Dengan demikian diperlukan tenaga kerja semakin banyak untuk memproduksi barang/jasa tersebut sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun (Kristanto, 2014:8).

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan, tetapi rata-rata tingkatnya masih tinggi. Belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan ke seluruh kabupaten/kota menjadi penyebabnya, padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan bagi tiap kabupaten/kota dalam usaha mengatasi kemiskinan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan?

3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.
2. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.
3. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Referensi dan memberikan informasi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan serta menambah studi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Perbendaharaan kepustakaan ilmiah bagi mahasiswa khususnya mengenai pengentasan kemiskinan.
3. Masukkan bagi pengambil kebijakan dalam menetapkan kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan publik.
4. Sebagai bahan tambahan ilmu yang dapat memperkaya pengetahuan dan sarana untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku kuliah serta sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan strata 1 pada jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, (Chambers pada Adit Agus Prastyo, 2010: 18) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*poverty*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*) dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak di batasi pada bidang ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Definisi menurut UNDP (dalam Cahyat 2007: 2), kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2/hari.

2. Kemiskinan relatif

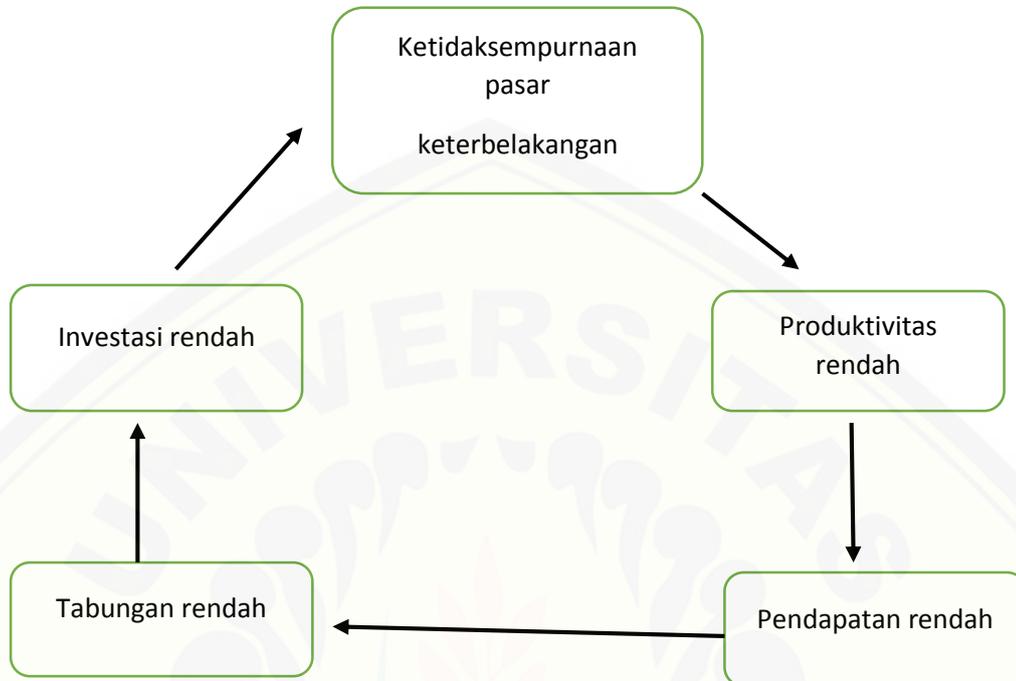
Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Todaro (1995:37) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) luasnya negara, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) relatif pentingnya sektor publik dan swasta, (5) perbedaan struktur industri

2.1.2 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Penyebab kemiskinan bermula pada teori lingkaran setan kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi

berakibat pada keterbelakangan, dst. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nukse,



Gambar 2.1 Lingkaran Setan (*The Vicious Circle of Poverty*) (Sumber : Kuncoro (1997:107))

Menurut Nasikun dalam Suryawati (2005:48), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu :

1. *policy induces processes*, yaitu proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
2. *socioeconomic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi pada ekspor
3. *population growth*, perspektif yang didasari oleh teori malthus, bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan penambahan pangan seperti deret hitung

4. *resources management and environment*, adalah unsur manajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
5. *natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam, misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan teru-menerus.

2.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah yang mencerminkan perubahan total suatu masyarakat tanpa mengabaikan kebutuhan dasar dan keinginan sosial untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu, pembangunan ekonomi secara teoritis diartikan sebagai proses kenaikan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.

Menurut Jhingan (2010), persyaratan pembangunan ekonomi yaitu :

1. Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri atau daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materiil harus muncul dari masyarakat.
2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar, ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan
3. Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri yang ditandai oleh meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya sektor primer.
4. Pembentukan modal merupakan faktor yang paling penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi dan dikaitkan sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi.
5. Kriteria investasi yang tepat, memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian.

6. Persyaratan sosio-budaya. Wawasan sosio budaya serta organisasinya harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan.
7. Administrasi. Dibutuhkan alat perlengkapan administratif untuk perencanaan ekonomi pembangunan.

Menurut Arsyad (1999:107) mendefinisikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses yang mencakup pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ditunjukkan secara utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintah serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2.1.4 Teori Pertumbuhan Neo- Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950- an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis- analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Teori ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan faktor-faktor produksi (jumlah penduduk, tenaga kerja, akumulasi kapital) dan tingkat kemajuan teknologi.

Model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi mempengaruhi output perekonomian serta pertumbuhannya sepanjang waktu. Analisis model pertumbuhan Solow dibagi menjadi tiga tahap analisis, yaitu: (1) dengan asumsi angkatan kerja dan teknologi tetap, (2) dengan asumsi hanya teknologi tetap, dan (3) angkatan kerja dan teknologi berubah.

Menurut Neo-Klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada tingkat teknik tertentu, tingkat bunga akan

menentukan tingginya tingkat investasi. Jika tingkat bunga rendah, maka investasi akan tinggi, dan demikian pula sebaliknya apabila tingkat bunga tinggi, maka investasi akan rendah. Sebagai akibat adanya investasi yang bertambah maka tingkat bunga naik yang pada gilirannya akan menaikkan jumlah tabungan. Apabila permintaan terhadap investasi berkurang maka tingkat bunga turun dan harga barang- barang kapital kembali turun, hasrat menabung turun. Pada tingkat perkembangan ini, akumulasi modal berakhir, dan perekonomian statis atau tidak mengalami perkembangan (Suryana, 2000).

Berbeda dengan pandangan klasik, bahwa pertumbuhan ekonomi akan macet karena terbatasnya sumber- sumber alam. Neoklasik yakin dengan kemajuan- kemajuan teknik dan perbaikan kualitas buruh cenderung meningkat pendapatan yang lebih tinggi sehingga permintaan masyarakat akan meningkat dan seterusnya (Suryana, 2000).

Ada 4 (empat) anggapan yang melandasi model Neo-Klasik (Boediono, 1999) :

- a. Tenaga kerja (atau penduduk), L , tumbuh dengan laju tertentu, misal per tahun.
- b. Adanya fungsi produksi $Q = f(K, L)$ yang berlaku bagi setiap periode.
- c. Adanya kecenderungan menabung (*propensity to save*) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dan output (Q). Tabungan masyarakat $S = sQ$, bila Q naik S juga naik, dan turun bila Q turun.
- d. Semua tabungan masyarakat diinvestasikan $S = I = \Delta K$. Dalam model Neo-Klasik tidak lagi dipermasalahkan mengenai keseimbangan S dan I

Model pertumbuhan Neo-Klasik Solow (*Solow neoclassical growth model*), yang tertuang dalam —*A Contribution to The Economic Growth*”, merupakan pilar yang sangat memberi kontribusi terhadap teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, sehingga penggagasnya, Robert Solow dianugerahi hadiah di bidang nobel ekonomi. Dalam bentuknya yang lebih formal, model pertumbuhan neoklasik Solow memakai fungsi produksi agregat standar, yakni:

$$Y = TK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$$

dimana Y adalah output, K adalah modal, L adalah tenaga kerja dan T adalah teknologi. Karena tingkat kemajuan teknologi (total factor productivity) ditentukan

dengan eksogen, model neoklasik Solow terkadang juga disebut model pertumbuhan eksogen (exogeneous growth model). Usaha untuk memperbaiki kekurangan model Solow, dinyatakan dengan memecahkan total factor productivity dengan memasukkan variabel lain, dimana variabel ini dapat menjelaskan pertumbuhan yang terjadi. Model pertumbuhan yang demikian disebut model pertumbuhan endogen (endogeneous growth model).

Model pertumbuhan endogen menganggap bahwa perdagangan internasional penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dalam model ini perdagangan internasional diukur melalui aktivitas ekspor dan impor, yaitu:

$$Y=F(A_i, K_i, L_i)$$

dimana Y adalah output, A adalah indeks produktivitas, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, i adalah tahun, sedang indeks produktivitas (A) adalah fungsi dari ekspor (X) dan impor (M), yakni:

$$A_i= F(X_i, M_i)$$

Terdapat beberapa studi yang dilakukan untuk menyempurnakan model pertumbuhan ekonomi neoklasik dengan tujuan untuk memperjelas dan menambahkan dasar- dasar teoritis bagi sumber- sumber pertumbuhan ekonomi, salah satunya dilakukan oleh tiga ekonom yakni Mankiw, Romer, dan Weil (dalam Esa Suryaningrum A., 2000) yang menyatakan bahwa model pertumbuhan Solow hanya mampu menerangkan hubungan modal dan tenaga kerja saja, namun bukan besarnya (*magnitude*) hubungan tersebut sehingga dimasukkan variabel mutu modal manusia untuk membantu menjelaskan pola pertumbuhan ekonomi selain modal dan tenaga kerja, yaitu:

$$Y= TK_t^\alpha L_t^\beta H^{1-\alpha-\beta}$$

dimana Y adalah output, K adalah modal, L adalah tenaga kerja dan T adalah teknologi dan H adalah modal manusia. Menurut teori pertumbuhan Solow- Swan, secara garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori Harrod- Domar, dimana asumsi yang melandasi model ini yaitu:

1. Tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu, misalnya P per tahun.
2. Adanya fungsi produksi $Q = f(K,L)$ yang berlaku bagi setiap periode

3. Adanya kecenderungan menabung oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output (Q). Tabungan masyarakat $S = sQ$; bila Q naik S juga naik, dan sebaliknya.
4. Semua tabungan masyarakat di investasikan $S = I = \Delta K$.

Sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan menabung, maka dari output disisakan sejumlah proporsi untuk di tabung dan kemudian di investasikan. Dengan begitu, maka terjadi penambahan stok kapital (Boediono, 1992:81-82). Menurut Solow, penawaran dan permintaan berperan penting dalam menentukan output suatu perekonomian. Oleh karena itu, komponen utama dari teori pertumbuhan Solow adalah fungsi produksi yang merupakan dasar dari penawaran dan fungsi konsumsi yang merupakan dasar dari permintaan.

2.1.5 Teori Upah

Upah dan pengangguran memiliki keterkaitan yang cukup erat dimana tinggi rendahnya upah akan mempengaruhi jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja yang pada akhirnya akan berdampak pada jumlah pengangguran. Upah merupakan pembayaran jasa-jasa fisik maupun mental kepada tenaga kerja. Upah uang yaitu jumlah uang yaitu diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik yang digunakan dalam proses produksi. (Sukirno dalam I Made Yogatama, 2010: 24).

Sistem pengupahan mengandung tiga prinsip yaitu:

1. pemberian imbalan atau nilai pekerjaan
2. penyediaan insentif
3. jaminan kebutuhan buruh

Upah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penawaran dan permintaan tenaga kerja, adanya perubahan upah akan mempengaruhi besar kecilnya penawaran tenaga kerja, sesuai dengan hukum penawaran bahwa tingkat upah yang tinggi akan menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang

ditawarkan. Jika tingkat upah relatif rendah maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan menjadi sedikit.

upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.

2.1.6 Upah Minimum

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerja. Menurut Kaufman dalam Achmad Khabibi (2010:49), tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per- 01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per- 01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang di maksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu.

Menurut Budiyono, SH (2007: 15), Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan penetapan upah minimum yaitu :

- a. sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot.
- b. mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan.
- c. meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah.

Sedangkan secara Makro,penetapan upah minimum bertujuan untuk :

- a. pemerataan pendapatan.
- b. peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja.
- c. perubahan struktur biaya industri sektoral.

- d. peningkatan produktivitas kerja nasional dan peningkatan etos dan disiplin kerja.
- e. memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan bipartite.

Upah minimum dapat dibedakan menjadi Upah Minimum Regional dan Upah Minimum Sektoral

1. Upah Minimum Regional

Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, Upah Minimum Regional (UMR) dibedakan menjadi dua yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR tk.I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR tk.II). Namun sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1,3,4,8,11,20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR tk.I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Tingkat II (UMR tk.II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UM kab/kota).

2. Upah Minimum Sektoral

Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum sektoral dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II). Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka terjadi perubahan istilah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II

(UMSR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Sektorial Kabupaten /Kota (UMS kab/kota).

Variabel-variabel yang mempengaruhi upah minimum regional (UMR) Tingkat I dan II sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :Per-01/Men/1999, adalah sebagai berikut : kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, tingkat upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-17/Men/VIII/2006 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 (4) tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa besaran upah minimum antara lain didasarkan pada tahap pencapaian KHL, pertumbuhan PDRB, produktivitas, dan mempertimbangkan keberadaan sektor marjinal (usaha yang paling tidak mampu). Pada pelaksanaannya, pertimbangan pada usaha tidak mampu ternyata belum dapat di operasionalkan.

2.1.6.1 Teori upah efisiensi

Teori upah efisiensi (efficiency-wage) menyatakan upah yang tinggi membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan menurunkan tagihan upah perusahaan, itu juga akan menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Teori upah-efisiensi yang pertama menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Pengaruh upah terhadap efisiensi pekerja dapat menjelaskan kegagalan perusahaan untuk memangkas upah meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja. Meskipun akan mengurangi tagihan upah perusahaan, maka pengurangan upah akan memperendah produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Teori upah-efisiensi yang kedua, menyatakan bahwa upah yang tinggi menurunkan perputaran tenaga kerja. Dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan mengurangi frekuensi pekerja yang keluar dari pekerjaan, sekaligus mengurangi waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk

menarik dan melatih pekerja baru. Teori upah-efisiensi yang ketiga menyatakan bahwa kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayar kepada karyawannya. Jika perusahaan mengurangi upahnya, maka pekerja terbaik bisa mengambil pekerjaan di tempat lain, meninggalkan perusahaan dengan pekerja yang tidak terdidik yang memiliki lebih sedikit alternatif. Dan teori upah-efisiensi yang keempat menyatakan bahwa upah yang tinggi meningkatkan upaya pekerja. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat memantau dengan sempurna upaya para pekerja, dan para pekerja harus memutuskan sendiri sejauh mana mereka akan bekerja keras. Semakin tinggi upah, semakin besar kerugian bagi pekerja bila mereka sampai dipecat. Dengan membayar upah yang lebih tinggi, perusahaan memotivasi lebih banyak pekerja agar tidak bermalasan dan dengan demikian meningkatkan produktivitas mereka. Meskipun keempat teori upah-efisiensi ini secara rinci berbeda, namun teori-teori tersebut menyuarakan topik yang sama: karena perusahaan beroperasi lebih efisien jika membayar pekerjanya dengan upah yang tinggi, maka perusahaan dapat menganggap bahwa mempertahankan upah di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan adalah menguntungkan. (Mankiw, 2006:124)

Pandangan yang lainnya (bersebrangan) dengan teori neoklasik yakni *efficiency wage theory* (teori upah efisiensi). Teori upah efisiensi ini berfokus pada upah sebagai tujuan yang memotivasi buruh. Jumlah usaha yang dibuat buruh dalam pekerjaannya adalah berhubungan terhadap seberapa baik pekerjaan itu membayar relatif terhadap alternatif pekerjaan lainnya. Perusahaan akan bersedia membayar upah di atas upah keseimbangan pasar untuk memastikan bahwa buruh bekerja keras agar tidak kehilangan pekerjaannya yang baik itu. Teori upah efisiensi ini juga menyebutkan dengan penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk menyekolahkan anaknya dan memberi nutrisi yang lebih baik bagi anak-anaknya. Keduanya dalam jangka panjang akan memberi dampak yang besar terhadap peningkatan produktivitas. Upah yang dibayarkan menurut teori ini jauh di atas upah keseimbangan, hal tersebut selain akan meningkatkan produktivitas juga akan

menimbulkan loyalitas pekerja, membuat lebih banyak pekerja yang berkualitas (Indahsari, 2016: 28)

2.1.7 Pengangguran

Pengangguran terbuka adalah persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. (Badan Pusat Statistik). Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama (Toni Kussetiyono, 2013: 43).

Berdasarkan pendekatan angkatan kerja, pengangguran terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Pengangguran friksional. Pengangguran jenis ini adalah pengangguran yang muncul karena pencari kerja masih mencari pekerjaan yang sesuai jadi ia menganggur bukan karena tidak ada pekerjaan. Pengangguran ini tidak menimbulkan masalah, dan bisa diselesaikan dengan pertumbuhan ekonomi.
2. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang muncul karena perubahan struktur dan komposisi perekonomian. Pengangguran ini sulit diatasi karena terkait dengan strategi pembangunan sebuah negara. Meskipun demikian, pengangguran jenis ini bisa diatasi dengan melakukan pelatihan agar tercipta tenaga kerja terampil.
3. Pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi karena faktor musim, misalnya para pekerja di industri yang mengandalkan hidupnya dari pesanan. Pengangguran jenis ini juga tidak menimbulkan banyak masalah. Meskipun belum ada bukti empirik yang mendukung, pengangguran yang muncul karena keterpurukan industri sebagian besar adalah pengangguran friksional dan struktural. Pengangguran friksional yang muncul di Indonesia tidak karena menganggur secara “sukarela” melainkan karena kondisi krisis ekonomi (M. Kuncoro dalam Whisnu Adi, 2011: 40).

2.1.7.1 Teori Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro, dkk, 2005). Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

2.1.8 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Kuznet dalam Jhingan 2003, pada Ernawati, (2011:29) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (dalam Achmad Khabhibi,2010:46), mengemukakan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat

kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan akan menurunkan tingkat kemiskinan, hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

2.1.9 Hubungan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan (Achmad Khabhibi, 2010:49).

Peran pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah sangat diperlukandalam menyikapi dampak penetapan upah minimum. Tidak bisa hanya pengusaha saja yang harus menanggung dampak penetapan upah minimum ini. Dengan pengertian dan pemahaman serta kerjasama dari semua pihak yang terkait dengan hubungan industrial ini maka dapat dicapai tujuan bersama yaitu pekerja/buruh sejahtera, perusahaan berkembang dan lestari serta pemerintah dapat menjaga perkembangan dan peningkatan perekonomian dengan baik.

2.1.10 Hubungan Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali, jika suatu masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan atau kesejahteraanya tinggi, namun di dalam masyarakat ada juga yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran secara otomatis akan mengurangi kesejahteraan suatu masyarakat yang secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

(Sukirno dalam I Made Yogatama, 2010:34), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu

negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Okta Ryan (2013), dalam penelitian yang berjudul “pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011”. Dalam penelitian menggunakan metode Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier data panel dengan metode *FEM*. Dalam penelitian menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pengangguran terbuka dan inflasi. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Fakthul Mufid Cholili dan M. Purdjirdjo (2014). Penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah dengan judul “analisis pengaruh pengangguran, PDRB dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin (studi kasus 33 provinsi di Indonesia). Alat analisis yang digunakan adalah model ordinary least square (OLS). Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh secara simultan dari ketiga variabel independen. Namun ketika di uji secara parsial PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan IPM dan pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

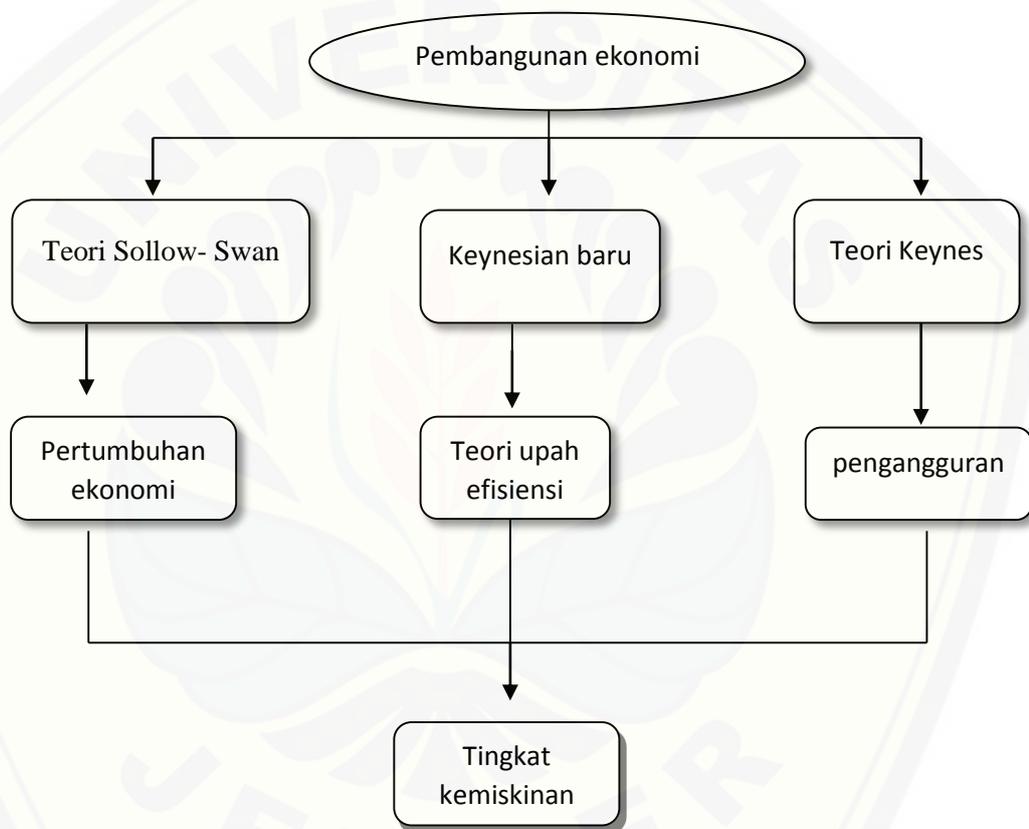
Reggi Irfan Pambudi (2016) Penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah dengan judul “ analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Jawa timur” Alat analisis yang digunakan adalah model ordinary least square (OLS). Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh secara simultan dari ketiga variabel independen. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan, upah minimum regional berpengaruh negatif signifikan, dan pengangguran berpengaruh positif signifikan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Variabel penelitian | Metode analisis | Hasil penelitian |
|----|---|--|--|--|--|
| 1 | Okta Ryan (2013) | Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011 | pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pengangguran terbuka dan inflasi | metode analisis regresi linier data panel dengan metode <i>FEM</i> | Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. |
| 2 | Fakthul Mufid Cholili dan M. Purdjirdjo (2014). | analisis pengaruh pengangguran, PDRB dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin (studi kasus 33 provinsi di Indonesia | PDRB, IPM, Penduduk Miskin | OLS | Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh secara simultan dari ketiga variabel independen. Namun ketika di uji secara parsial PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan IPM dan pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. |
| 3 | Reggi Irfan Pambudi (2016) | Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional dan Pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Jawa timur | Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, pengangguran | OLS | Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari ketiga variabel. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan, upah minimum regional berpengaruh negatif signifikan, dan pengangguran berpengaruh positif signifikan. |

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas (Pertumbuhan Ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka) yang mempengaruhi tingkat penduduk miskin. Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas alur pemikiran dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Gambar 2.2



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan Pendapatan Regional dapat menyebar secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat terutama untuk masyarakat miskin sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Upah minimum mencerminkan pendapatan yang diterima pekerja, adanya kenaikan tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penetapan upah minimum yang pantas dan tepat diharapkan mendorong penduduk yang berada dibawah kemiskinan mampu hidup layak sehingga tingkat kemiskinan akan turun.

Pengangguran pada suatu daerah dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya kemiskinan, semakin tinggi tingkat pengangguran maka dapat dikatakan semakin rendahnya tinggi pula angka kemiskinan di suatu daerah.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara dan harus diuji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2012-2015
2. Upah minimum diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2012-2015
3. Tingkat pengangguran diduga berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2012-2015

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan tiga variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat penduduk miskin, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu Pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pengangguran. Wilayah penelitian di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Selama waktu empat tahun dari 2012 – 2015.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS Jawa Timur), Peraturan Gubernur Jawa Timur – sumber lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pertumbuhan Ekonomi (persen), Upah Minimum (rupiah), tingkat pengangguran terbuka (persen), dan Tingkat Kemiskinan (persen). Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu data yang disusun secara kronologis menurut waktu pada suatu variabel tertentu (Kuncoro, 2011:146). Data runtun waktu (*time series*) yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2012 – 2015. Sedangkan data *cross section* adalah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

3.3 Metode Analisis Data

Metode ini menggunakan analisis data regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan data panel. Metode regresi data panel ini digunakan untuk mengestimasi pengaruh antara Pertumbuhan ekonomi, Upah minimum dan Tingkat pengangguran terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 sampai tahun 2015. Melalui metode *OLS* ini maka akan memberikan hasil regresi yang baik tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Nachrowi & Usman, 2006:11). Data panel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara data runtun waktu (*time series*) dan data deret lintang (*cross section*). Sebagai alat

pengolahan data digunakan program *Eviews* 9. Data panel digunakan karena memiliki beberapa kelebihan, Baltagi dalam Gujarati (2012:237) menjelaskan tentang beberapa kelebihan data panel diantaranya :

- a. Data yang berhubungan dengan individu, perusahaan, negara bagian, negara dan lain – lain, dari waktu ke waktu terdapat batasan heterogenitas dalam unit – unit tersebut. Teknik estimasi data panel yang heterogen tersebut secara eksplisit dapat diperhitungkan.
- b. Dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section*, data panel dapat memberikan lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinearitas antar variabel, derajat bebas lebih besar dan lebih efisien.
- c. Data panel lebih cocok untuk mempelajari dinamika perubahan, daripada studi berulang – ulang *cross section*.
- d. Data panel lebih baik dalam mendeteksi dan mengukur dampak sederhana yang tidak dapat dilihat pada data *time series* murni ataupun *cross section* murni.
- e. Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit. Misalnya fenomena perekonomian berskala dan perubahan teknologi lebih tepat dipelajari menggunakan data panel.
- f. Data panel bisa meminimumkan bias yang terjadi apabila kita mengagregasi individu – individu atau perusahaan – perusahaan kedalam agregasi besar dengan membuat data menjadi beberapa ribu unit.

Dalam model data panel persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

Dimana N adalah banyaknya data *cross section*.

Sedangkan model data panel dengan persamaan model data *time series* adalah:

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana T adalah banyaknya data *time series*.

Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*, maka dapat ditulis dengan model berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it}$$

$T = 1, 2, \dots, T$; dan $i = 1, 2, \dots, N$

Keterangan :

T = Banyaknya waktu

N = Banyaknya observasi

$N \times T$ = Banyaknya data panel

Adapun fungsi model ekonomi dari variabel penelitian sebagai berikut:

$$Y = f (X_1, X_2, X_3)$$

Model ekonomi tersebut kemudian ditransformasikan kedalam model ekonometrika dengan menggunakan data panel menjadi:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

$i = 1, 2, \dots, 38$; $t = 1, 2, \dots, 4$

Dimana :

Y : Tingkat Kemiskinan (%)

X_1 : Pertumbuhan ekonomi (%)

X_2 : Upah minimum (Rupiah)

X_3 : Tingkat pengangguran terbuka (%)

α : intersep

β_{it} : koefisien variabel

$i = 1, 2, \dots, 38$: banyaknya sampel observasi

$t = 1, 2, \dots, 4$: banyaknya sampel waktu

Analisis ini menggunakan data panel dapat menggunakan dua metode yaitu *Fixed Effect Method (FEM)* dan *Random Effect Method (REM)* . sebelum dilakukan pengestimasi model penelitian, dilakukan uji spesifikasi untuk menganalisis apakah menggunakan FEM atau REM. Pengujian tersebut dilakukan menggunakan Uji Hausman (*Hausman-test*).

3.3.1 Analisis Regresi Data Panel

Metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran dan kemiskinan yaitu analisis data panel, dimana merupakan kombinasi antara deret waktu (*time series data*) dan deret

hitung (*cross section*). Model persamaan variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_{oi} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + E_{it}$$

Fungsi diatas menjelaskan pengertian bahwa Kemiskinan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pengangguran, sedangkan alpha nol merupakan konstanta. Diasumsikan bahwa variabel lain diluar variabel penelitian tidak berubah.

Dimana:

Y = tingkat penduduk miskin

X1 = Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB harga konstan

X2 = Upah minimum kabupaten

X3 = Tingkat Pengangguran Terbuka

β_1 = Parameter X1

β_2 = Parameter X2

β_3 = Parameter X3

α = Konstanta

i = Kabupaten/Kota

t = Waktu

E_t = Variabel Penganggu

Analisis data menggunakan regresi data panel mempunyai beberapa keuntungan yaitu :

1. Data panel merupakan dua gabungan data yaitu *time series* dan *cross section* sehingga mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga menghasilkan *degree of freedom (df)* yang lebih besar.
2. Menggabungkan informasi data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika muncul masalah penghilangan variabel (*omitted variabel*). (Widarjono, 2009: 229).

3.3.2 *Fixed Effect Model* (FEM)

Metode FEM digunakan untuk mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk mengetahui adanya perubahan – perubahan dalam intercep. Asumsi yang digunakan dalam metode ini adalah:

- a. Intersep dan koefisien slope adalah tetap antar waktu dan ruang, error term mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu,
- b. Slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu,
- c. Slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu,
- d. Intersep dan slope berbeda antar individu dan
- e. Intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu.

3.3.3 *Random Effect Model* (REM)

Random effect digunakan untuk mengestimasi data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (Suliswanto, 2010). Teknik yang digunakan dalam metode ini adalah dengan menambah variabel *error* yang mungkin akan muncul dalam hubungan antar waktu dan antar individu. Metode OLS tidak dapat digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien sehingga lebih baik menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS).

3.4 Uji Penentuan Model

3.4.1 Uji Chow

Uji chow digunakan untuk memilih salah satu model terbaik pada regresi data panel, yaitu antara model efek tetap (*fixed effect model*) dengan *Pooled Least Square* model (PLS) dengan hhipotesis berikut:

H_0 : menggunakan *Pooled Least Square* model (PLS)

H_A : menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM)

Dasar penolakan H_0 adalah dengan cara pertimbangan uji F:

1. Jika $F_{\text{statistik}} \leq F_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $F_{\text{statistik}} >$ nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$) maka H_0 diterima, menunjukkan model yang digunakan adalah *Pooled Least Square* model (PLS)

2. Jika $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $F_{\text{statistik}} \leq$ nilai probabilitas kritis ($\alpha = 5\%$) maka H_0 ditolak, menunjukkan model yang digunakan *Fixed Effect Model* (FEM)

3.4.2 Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk memilih salah satu model terbaik pada regresi data panel, yaitu antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut (Ekananda, 2015:405):

H_0 : menggunakan *Random Effect Model* (REM)

H_A : menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM)

Chi- Square sebagaimana berikut:

1. $\text{Chi}_{\text{statistik}} \leq \text{Chi}_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas kritis, maka hipotesis nol (H_0) diterima. Artinya, tidak ada hubungan antara efek individu dengan variabel bebas sehingga metode yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).
2. $\text{Chi}_{\text{statistik}} \geq \text{Chi}_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas kritis, maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Artinya, efek individu berkorelasi dengan variabel bebas sehingga metode yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

3.5 Uji Statistik

Dari persamaan regresi data panel, selanjutnya dilakukan pengujian statistik antara lain: (a) Uji $F_{\text{statistik}}$ (uji pengaruh secara simultan), (b) uji $t_{\text{statistik}}$ (uji pengaruh secara parsial), (c) uji R^2 (koefisien determinasi).

3.5.1 Uji F (uji pengaruh secara simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka secara bersama – sama terhadap kemiskinan di Jawa Timur:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2 / (k-1)}{1 - R^2 / (n-1)}$$

Dimana :

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel

Dalam pengujian ini telah dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- 1) $H_0 = b_1 = b_2 = b_3 = 0$, berarti variabel Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
- 2) $H_a = b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, berarti variabel Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Pada taraf signifikan 5% kriteria pengujian yang digunakan adalah :

- 1) Jika nilai F hitung $>$ F tabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel independen secara serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai F hitung $<$ F tabel maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel independen secara serentak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.2 Uji t (secara parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

$$t_{\text{hitung}} = \frac{b}{sb}$$

Uji t dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Nilai t hitung dapat diperoleh dari nilai t statistik pada output eviews, sedangkan nilai t tabel dapat diperoleh dari tabel t dengan menggunakan *degree of freedom* (df) sebesar $n-k$. Apabila t hitung lebih besar daripada t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sebaliknya jika t hitung lebih kecil daripada t tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Cara kedua yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas output eviews dengan nilai α 5% (0,05).

3.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui sumbangan atau kontribusi variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat, maka akan ditinjau dari hasil uji koefisien determinan atau uji R^2 . Nilai R^2 ini terletak diantara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin

mendekati nilai 1 maka semakin besar nilai variasi variabel terikat yang dapat diterangkan secara bersama – sama oleh variabel bebas atau pengaruh presentase variabel X1, X2 dan X3 terhadap variabel Y adalah besar. Adapun rumus yang digunakan dalam pengujian ini adalah

$$R^2 = \frac{\sum(\hat{Y}^1 - \hat{Y})^2}{\sum(Y^1 - \hat{Y})^2}$$

Nilai R^2 yang sempurna adalah satu (1), yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variasi independen yang dimasukkan ke dalam model. Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang diambil adalah :

1. Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat lemah.
2. Nilai R^2 mendekati satu, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.6 Uji Asumsi Klasik

Hasil analisis regresi data panel yang signifikan sudah dapat menentukan bahwa model regresi yang diperoleh dapat menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Untuk memperjelas dan memperkuat pengaruh dari hasil analisis regresi yang diperoleh maka digunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik perlu dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan – penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada hakikatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel – variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien.

3.6.1 Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel bebas. Dalam hal ini variabel – variabel bebas tersebut tidak ortogonal. Variabel yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasinya sama dengan nol. Dalam uji ini dilakukan pendeteksian terlebih dahulu, kemudian jika hal tersebut terjadi, barulah dilakukan tindakan untuk menghilangkan efek dari multikolinearitas. Uji multikolinearitas dalam penelitian

ini dilakukan dengan melihat nilai korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas maka dapat dilakukan dengan dengan menguji koefisien antar variabel independen. Apabila koefisien korelasinya cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga model tersebut terdapat multikolinearitas. Sebaliknya, Apabila koefisien korelasi rendah dibawah 0,85 maka model tersebut tidak terdapat multikolinearitas (Widajono, 2013:114).

Untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya multikolinearitas, maka digunakan cara *regresi auxiliary*. Regresi *auxiliary* digunakan dengan menghitung R^2 dari setiap regresi X_i pada variabel regresor (R^2_i). Identifikasi multikolinearitas dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai pada R^2 pada semua model *auxiliary*. Jika R^2 model *auxiliary* lebih besar dari model semua (R^2 model semua lebih rendah dibandingkan R^2 pada *auxiliary regression*) maka kita mendeteksi adanya multikolinearitas (Ekananda, 2015: 99)

3.6.2 Uji heteroskedastistas

Heteroskedastistas adalah varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Konsekuensi adanya heteroskedastistas dalam model regresi adalah penaksir (estimator) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel besar maupun kecil, walaupun penaksir yang diperoleh menggambarkan populasinya tidak bias dan bertambahnya sampel yang digunakan akan mendekati nilai sebenarnya (konsisten). Ini disebabkan varians yang tidak minimum atau tidak efisien (Aligafri,2011:85)

Diagnosis adanya heteroskedastistas secara kuantitatif dalam suatu regresi dapat dilakukan pengujian korelasi ranking *Spearman*. Korelasi ranking *Spearman* dapat dihitung dengan formula:

$$r_s = 1 - 6 \left(\frac{\sum d_i^2}{N(N^2 - 1)} \right)$$

dimana:

d_i : selisish ranking standar deviasi (S) dan ranking nilai mutlak *error* (e)

N : banyaknya sampel

Selain melakukan uji korelasi ranking *Spearman*, diagnosis terhadap kemungkinan adanya heteroskedastisitas dalam suatu model adalah dengan melakukan uji Glesjer (*Glesjer test*). Uji ini dikaukan dengan cara membuat model regresi yang melibatkan nilai absolut residual, sebagai variabel dependen, terhadap semua variabel independen. Jika semua variabel independen signifikan secara statistik, maka dalam model terdapat heteroskedastisitas (Aligafri,2011:86). Perumusan hipotesis dari uji glesjer adalah:

1. H_0 : varian dari nilai sisa tidak sama antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, dengan kata lain tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
2. H_A : varian dari nilai sisa bernilai sama antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, dengan kata lain terjadi masalah heteroskedastisitas.

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai *p-value* dengan tingkat signifikansi yang digunakan:

1. Jika $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $t_{\text{statistik}} \leq$ nilai probabilitas kritis ($\alpha=5\%$). Maka hipotesis nol (H_0) diterima. Artinya, secara statistik dapat dibuktikan bahwa model penelitian terjadi gejala heteroskedastisitas
2. Jika $t_{\text{statistik}} \leq t_{\text{tabel}}$ atau nilai probabilitas $t_{\text{statistik}} >$ nilai probabilitas kritis ($\alpha=5\%$). Maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Artinya, secara statistik dapat dibuktikan bahwa model penelitian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

3.6.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode dengan periode sebelumnya ($t-1$). Secara sederhana analisis yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi adalah dengan mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model regresi kedalam bentuk persamaan beda umum (*generalized difference equation*).

Dalam penelitian ini pengujian autokorelasi menggunakan uji durbin-watson. Autokorelasi dapat dilihat dengan tabel durbin-watson yang didalamnya

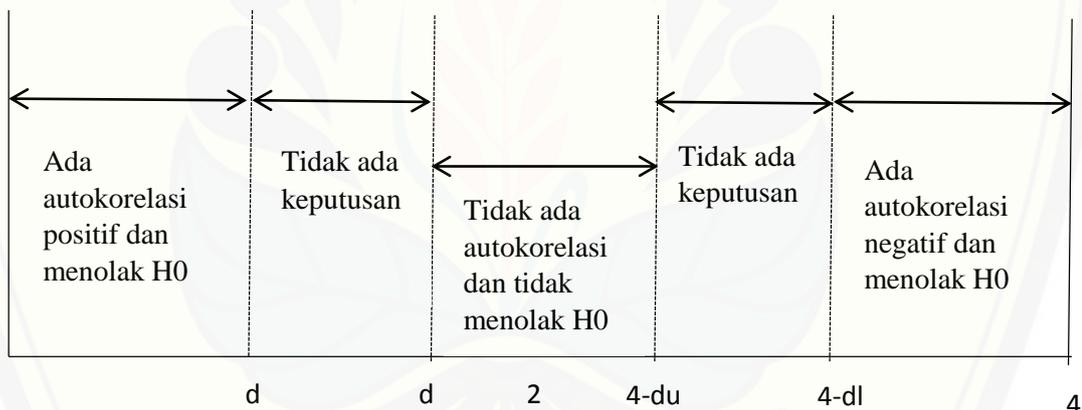
terdiri atas dua nilai, yaitu batas bawah (d_1) dan batas atas (d_2). Nilai ini dapat digunakan sebagai pembanding uji DW yang aturannya tertera pada tabel 3.1

Tabel 3.1. Uji Statistik Durbin-Watson

| Hipotesis Nol | keputusan | kriteria |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ada autokorelasi positif | Tolak | $0 < d < d_l$ |
| Tidak ada autokorelasi positif | Tidak ada keputusan | $d_l < d < d_u$ |
| Ada autokorelasi negatif | Tolak | $4 - d_l < d < 4$ |
| Tidak ada autokorelasi negatif | Tidak ada keputusan | $4 - d_u < d < 4 - d_l$ |
| Tidak ada autokorelasi | Terima | $d_u < d < 4 - d_u$ |

Sumber : Imam Gozali dalam Wijayanto, 2012

Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil uji durbin Watson dengan tabel durbin Watson. Aturan perbandingan ini dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Aturan membandingkan Uji Durbin Watson dengan tabel Durbin Watson

(Sumber : Imam Gozali dalam Wijayanto, 2012)

3.7 Definisi Operasional

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 58). Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel penelitian, yaitu variabel terikat (dependent variabel) dan variabel bebas (independent variabel).

3.7.1 Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)(Y)

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah tingkat penduduk miskin (Y) yang ada di Jawa Timur. Satuan dari variabel tingkat kemiskinan adalah dalam persen. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic needs approach) dalam hal ini Badan Pusat Statistik mendasarkan pada besarnya rupiah yang dikeluarkan perkapita/bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Kebutuhan minimum makanan menggunakan patokan 2.100 kalori/hari dan kebutuhan non makanan meliputi perumahan, sandang aneka barang dan jasa. Kebutuhan di bedakan dalam wilayah, yaitu wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. BPS menyebutkan ada 14 kriteria suatu keluarga/rumah tangga dikategorikan miskin, yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang,
2. Jenis lantai tempat tinggal terbat dari tanah / bambu / kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
4. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain,
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik,
6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai /air hujan,
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah,
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu,
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun,
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu kali/ dua kali dalam sehari,
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik,
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m² – buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan,

3.7.2 Variabel Bebas (*Independent Variabel*)(X)

1. Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} * 100$$

Dimana :

PDRB_t : PDRB tahun t

PDRB_{t-1} ; PDRB tahun sebelumnya

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau secara umum PDRB memberikan gambaran kinerja ekonomi makro suatu wilayah dari waktu ke waktu. Nilai PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Jawa Timur atas dasar harga konstan selama tahun 2012-2015. Satuan dari variabel pertumbuhan ekonomi ini adalah persen.

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (X2)

Upah minimum kabupaten/kota (X2) adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota, yang diterima oleh pekerja per bulan (BPS, 2008). dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per- 01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang di maksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. UMK yang digunakan dalam penelitian ini adalah upah minimum yang berlaku di Jawa Timur tahun 2012-2015 yang diukur dalam satuan rupiah. Data diambil dari Pergub Jatim No. 81 tahun 2011, 72 tahun 2012, 78 tahun 2013 dan 72 tahun 2014. Satuan dari variabel upah adalah rupiah.

3. Pengangguran Terbuka (X3)

Tingkat pengangguran terbuka (X3) adalah persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan di Jawa Timur tahun 2012-2015 yang diukur dalam satuan persen (BPS, 2008). Data diambil dari BPS. Satuan dari variabel pengangguran adalah persen.

Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka:

- a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
- c. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "tindakannya nyata", seperti:

mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. (BPS, 2018)



BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai keterkaitan yang erat, Pertumbuhan ekonomi sering kali dijadikan tolak ukur kinerja perekonomian suatu wilayah, akan tetapi belum pasti tingginya pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingginya juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berarti bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008:38), pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Jadi jika pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah tinggi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dan dapat dikatakan hidup dengan layak.

Hasil pengujian regresi data panel atas Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015 menunjukkan hubungan yang negatif signifikan. Semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka Tingkat kemiskinan semakin menurun.

2. Pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan

Selain pertumbuhan ekonomi, kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian

prestasi tertentu. Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Jika kebutuhan hidup minimum dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkat dan terbebas dari masalah kemiskinan.

Hasil pengujian regresi data panel atas Upah Minimum terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015 menunjukkan hubungan yang negatif signifikan. Semakin tinggi Upah Minimum maka Tingkat kemiskinan semakin menurun.

3. Pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan

Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Jika masyarakat tidak menganggur dan memiliki penghasilan, penghasilan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan mereka untuk hidup. Jika kebutuhan hidupnya telah terpenuhi, sehingga tidak akan miskin, dan diharapkan tingkat pengangguran menjadi rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan pun akan semakin rendah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat. Bahkan, masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah-masalah baru di bidang ekonomi maupun non ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan

Hasil pengujian regresi data panel atas Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015 menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Semakin tinggi Tingkat Pengangguran maka Tingkat kemiskinan semakin meningkat

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah:

1. Kurangnya refrensi dalam pengambilan data selain dari BPS di Provinsi Jawa Timur dan sumber lainnya sehingga menyebabkan penelitian relatif lama,
2. Variabel independen dalam penelitian ini masih terbatas yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X1), Upah Minimum (X2), dan Tingkat Pengangguran (X3).

5.3 Saran

1. Penetapan upah minimum disarankan untuk memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
2. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal pencarian atau kesempatan kerja di daerahnya masing-masing agar terjadi penurunan tingkat kemiskinan misalnya dengan memberikan pinjaman lunak tanpa agunan untuk modal kerja usaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Whisnu, 2011. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Semarang: UNDIP.
- Adit Agus Prasetyo. 2010. “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Kemiskinan (studi kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)*”. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang
- Ady Soejoto dan Ameilia Karisma, 2013, *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur : Jurnal*
- Agus Widarjono. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Ketiga. EKONISIA. Yogyakarta.
- Agus Widarjono. 2013. *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*, Ekonosia, Jakarta.
- Algifari. 2011. *Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi*. Yogyakarta: BPFE.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. BPFE Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Tahun 2012*. BPS. Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Tahun 2013*. BPS. Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Tahun 2014*. BPS. Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Tahun 2015*. BPS. Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2011-2015*. BPS. Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2012-2016*. BPS. Jawa Timur.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota 2011-2015*. BPS. Jawa Timur.
- Baltagi, B. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition*. John Wiley & Sons.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta, BPFE UGM.
- Budiyono, 2007. *Penetapan Upah Minimum dalam Kaitanya dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan*. Tesis. Semarang : Universitas dipenogoro.
- Cahyat, A., Gönner, C. and Haug, M. 2007 *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia*. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Daryanto, A. dan Y. Hafizrianda. 2010. *Analisis Input-Output & Social Accounting Matrix untuk Pembangunan Ekonomi Daerah*. IPB Press.Bogor.
- Dwi, Ravi. 2010. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jateng Tahun 2005-2008*, Tidak Diterbitkan. Skripsi. Semarang: Universitas Dipenogoro.
- Ekananda, M. 2015. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Ernawati, 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2009*, Surakarta: USM.
- Esa A Suryaningrum. 2000. *Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia*. Media Ekonomi dan Bisnis Vol. XII No.1 Juni.
- Gujarati, D.N. 2007. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jilid 1. Edisi ke-3. Jakarta (ID): Erlangga.
- Gujarati, D.N.,2012, *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta.
- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin* : Jurnal.
- I Made, 2010. *Pengaruh Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Upah Pekerja, dan Nilai Total Ekspor Terhadap Investasi Asing langsung di Indonesia (1990-2009)*. Semarang, UNDIP.

- Indahsari, E.I. 2016. *Analisis Sistem Upah Islami dan Jaminan Sosial Terhadap Produktivitas Karyawan di CV, Eka Karya Mandiri Ngunut Tulungagung 2013-2015*. Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Jhingan, M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Terjemahan. Penerbit Rajawali. Jakarta.
- Karnaji. 2011. *Komitmen & Konsistensi Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan : Analisis Kasus Di Jawa Timur*. Skripsi. Surabaya. : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Khabhibi Acmad, 2010, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: UNDIP.
- Kristanto, P.D. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes Tahun 1997-2012*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan:Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2011. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Kussetiyono Toni, 2013. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Investasi, dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010*. Semarang: UNNES.
- Nachrowi, Nachrowi Djajal, dan Hardus Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pambudi, R.I. 2016. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur. 2011. *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012*. Jawa Timur.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur. 2012. *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013*. Jawa Timur.

- Peraturan Gubernur Jawa Timur. 2013. *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014*. Jawa Timur.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur. 2014. *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015*. Jawa Timur.
- Qarunnada, Luthfi. 2017. *Analisis Pengaruh Pendidikan Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini Terhadap Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rachman, Hasanuddin, 2005, *Pengaruh Pengupahan Sebagai langkah Strategis Stabilitas Dalam Hubungan Industrial*. Jakarta.
- Sandhika, A.W. 2012. *Analisis Pengaruh Aglomerasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk, dan Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal*. Skripsi. Semarang: Universitas Dipenogoro.
- Soesastro, H, dkk. 2005. *Pertumbuhan dan permasalahan ekonomi di indonesia dalam setengah abad terakhir Jilid I (1945-1959)*. Jakarta: kanisius.
- Sugiyono 2010. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif & RND*. Bandung: alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliswanto, M.S.W. 2010. "Pengaruh PDB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 8 No. 2, Desember 2010.
- Sumarsono, Sonny, 2009 *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia* , Yogyakarta: Edisi Pertama, Garaha Ilmu.
- Suryana, 2000. *Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Suryawati, C. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*.
- Todaro, Michael P, 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Terjemahan Haris Munandar, Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michel P. 1995. *Ekonomi Untuk Negara-Negara Berkembang*, Penerjemah : Agustinus Subekti, Ed, Jakarta: Bumi Aksara.

Yarlina yacob, 2012. *Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi kalimantan barat : jurnal*



Lampiran A.Rekapitulasi Data

| kabupaten/ kota | tahun | Y | X1 | X2 | X3 |
|------------------|-------|-------|------|-----------|------|
| Kab. Pacitan | 2012 | 17,29 | 6,33 | 750.000 | 1,02 |
| Kab. Pacitan | 2013 | 16,73 | 5,87 | 887.250 | 0,99 |
| Kab. Pacitan | 2014 | 16,18 | 5,20 | 1.000.000 | 1,08 |
| Kab. Pacitan | 2015 | 16,68 | 5,10 | 1.150.000 | 0,97 |
| Kab. Ponorogo | 2012 | 11,76 | 5,98 | 745.000 | 3,14 |
| Kab. Ponorogo | 2013 | 11,92 | 5,14 | 924.000 | 3,25 |
| Kab. Ponorogo | 2014 | 11,53 | 5,21 | 1.000.000 | 3,66 |
| Kab. Ponorogo | 2015 | 11,91 | 5,25 | 1.150.000 | 3,68 |
| Kab. Trenggalek | 2012 | 14,21 | 6,22 | 760.000 | 2,98 |
| Kab. Trenggalek | 2013 | 13,56 | 6,00 | 903.900 | 4,04 |
| Kab. Trenggalek | 2014 | 13,1 | 5,28 | 1.000.000 | 4,2 |
| Kab. Trenggalek | 2015 | 13,39 | 5,03 | 1.150.000 | 2,46 |
| Kab. Tulungagung | 2012 | 9,4 | 6,47 | 815.000 | 3,1 |
| Kab. Tulungagung | 2013 | 9,07 | 6,13 | 1.007.900 | 2,71 |
| Kab. Tulungagung | 2014 | 8,75 | 5,46 | 1.107.000 | 2,42 |
| Kab. Tulungagung | 2015 | 8,57 | 4,99 | 1.273.050 | 3,95 |
| Kab. Blitar | 2012 | 10,74 | 5,62 | 820.000 | 2,82 |
| Kab. Blitar | 2013 | 10,57 | 5,06 | 946.850 | 3,64 |
| Kab. Blitar | 2014 | 10,22 | 5,02 | 1.000.000 | 3,08 |
| Kab. Blitar | 2015 | 9,97 | 5,05 | 1.260.000 | 2,79 |
| Kab. Kediri | 2012 | 13,71 | 6,11 | 999.000 | 4,08 |
| Kab. Kediri | 2013 | 13,23 | 5,82 | 1.089.950 | 4,65 |
| Kab. Kediri | 2014 | 12,77 | 5,32 | 1.135.000 | 4,91 |
| Kab. Kediri | 2015 | 12,91 | 4,88 | 1.305.250 | 5,02 |
| Kab. Malang | 2012 | 11,04 | 6,77 | 1.130.500 | 3,75 |
| Kab. Malang | 2013 | 11,48 | 5,30 | 1.343.700 | 5,17 |
| Kab. Malang | 2014 | 11,07 | 6,01 | 1.635.000 | 4,83 |
| Kab. Malang | 2015 | 11,53 | 5,27 | 1.962.000 | 4,95 |
| Kab. Lumajang | 2012 | 12,4 | 6,00 | 825.391 | 4,6 |
| Kab. Lumajang | 2013 | 12,14 | 5,58 | 1.011.950 | 2,01 |
| Kab. Lumajang | 2014 | 11,75 | 5,32 | 1.120.000 | 2,83 |
| Kab. Lumajang | 2015 | 11,52 | 4,62 | 1.288.000 | 2,6 |
| Kab. Jember | 2012 | 11,81 | 5,83 | 920.000 | 3,77 |
| Kab. Jember | 2013 | 11,68 | 6,06 | 1.091.950 | 3,94 |
| Kab. Jember | 2014 | 11,28 | 6,21 | 1.270.000 | 4,64 |
| Kab. Jember | 2015 | 11,22 | 5,36 | 1.460.500 | 4,77 |
| Kab. Banyuwangi | 2012 | 9,97 | 7,24 | 915.000 | 3,41 |
| Kab. Banyuwangi | 2013 | 9,61 | 6,71 | 1.086.400 | 4,65 |

| | | | | | |
|------------------|------|-------|--------|-----------|------|
| Kab. Banyuwangi | 2014 | 9,29 | 5,72 | 1.240.000 | 7,17 |
| Kab. Banyuwangi | 2015 | 9,17 | 6,01 | 1.426.000 | 2,55 |
| Kab. Bondowoso | 2012 | 15,81 | 6,09 | 800.000 | 3,6 |
| Kab. Bondowoso | 2013 | 15,29 | 5,81 | 946.000 | 2,04 |
| Kab. Bondowoso | 2014 | 14,76 | 5,05 | 1.105.000 | 3,72 |
| Kab. Bondowoso | 2015 | 14,96 | 4,95 | 1.270.750 | 1,75 |
| Kab. Situbondo | 2012 | 14,34 | (5,19) | 802.500 | 3,33 |
| Kab. Situbondo | 2013 | 13,65 | 6,19 | 1.048.000 | 3,01 |
| Kab. Situbondo | 2014 | 13,15 | 5,79 | 1.071.000 | 4,15 |
| Kab. Situbondo | 2015 | 13,63 | 4,86 | 1.231.650 | 3,57 |
| Kab. Probolinggo | 2012 | 22,22 | 6,44 | 885.000 | 1,92 |
| Kab. Probolinggo | 2013 | 21,21 | 5,15 | 1.198.600 | 3,3 |
| Kab. Probolinggo | 2014 | 20,44 | 4,90 | 1.353.750 | 1,47 |
| Kab. Probolinggo | 2015 | 20,82 | 4,76 | 1.556.800 | 2,51 |
| Kab. Pasuruan | 2012 | 11,58 | 7,50 | 1.252.000 | 6,38 |
| Kab. Pasuruan | 2013 | 11,26 | 6,95 | 1.720.000 | 4,34 |
| Kab. Pasuruan | 2014 | 10,86 | 6,74 | 2.190.000 | 4,43 |
| Kab. Pasuruan | 2015 | 10,72 | 5,38 | 2.700.000 | 6,41 |
| Kab. Sidoarjo | 2012 | 6,44 | 7,26 | 1.252.000 | 5,37 |
| Kab. Sidoarjo | 2013 | 6,72 | 6,89 | 1.720.000 | 4,12 |
| Kab. Sidoarjo | 2014 | 6,4 | 6,44 | 2.190.000 | 3,88 |
| Kab. Sidoarjo | 2015 | 6,44 | 5,24 | 2.705.000 | 6,3 |
| Kab. Mojokerto | 2012 | 10,71 | 7,26 | 1.234.000 | 3,35 |
| Kab. Mojokerto | 2013 | 10,99 | 6,56 | 1.700.000 | 3,16 |
| Kab. Mojokerto | 2014 | 10,56 | 6,45 | 2.050.000 | 3,81 |
| Kab. Mojokerto | 2015 | 10,57 | 5,65 | 2.695.000 | 4,05 |
| Kab. Jombang | 2012 | 12,23 | 6,73 | 978.200 | 6,72 |
| Kab. Jombang | 2013 | 11,17 | 5,93 | 1.200.000 | 5,59 |
| Kab. Jombang | 2014 | 10,8 | 5,42 | 1.500.000 | 4,39 |
| Kab. Jombang | 2015 | 10,79 | 5,35 | 1.725.000 | 6,11 |
| Kab. Nganjuk | 2012 | 13,22 | 5,85 | 785.000 | 4,09 |
| Kab. Nganjuk | 2013 | 13,6 | 5,40 | 960.200 | 4,73 |
| Kab. Nganjuk | 2014 | 13,14 | 5,10 | 1.131.000 | 3,93 |
| Kab. Nganjuk | 2015 | 12,69 | 5,18 | 1.265.000 | 2,1 |
| Kab. Madiun | 2012 | 13,7 | 1,81 | 775.000 | 3,99 |
| Kab. Madiun | 2013 | 12,45 | 5,67 | 960.750 | 4,63 |
| Kab. Madiun | 2014 | 12,04 | 5,34 | 1.045.000 | 3,38 |
| Kab. Madiun | 2015 | 12,54 | 5,26 | 1.201.750 | 6,99 |
| Kab. Magetan | 2012 | 11,5 | 5,79 | 750.000 | 3,64 |
| Kab. Magetan | 2013 | 12,19 | 5,85 | 866.250 | 2,96 |
| Kab. Magetan | 2014 | 11,8 | 5,10 | 1.000.000 | 4,28 |

| | | | | | |
|-----------------|------|-------|--------|-----------|------|
| Kab. Magetan | 2015 | 11,35 | 5,17 | 1.150.000 | 6,05 |
| Kab. Ngawi | 2012 | 15,99 | 6,63 | 780.000 | 2,94 |
| Kab. Ngawi | 2013 | 15,45 | 5,50 | 900.000 | 4,97 |
| Kab. Ngawi | 2014 | 14,88 | 5,82 | 1.040.000 | 5,61 |
| Kab. Ngawi | 2015 | 15,61 | 5,08 | 1.196.000 | 3,99 |
| Kab. Bojonegoro | 2012 | 16,66 | 3,77 | 930.000 | 3,42 |
| Kab. Bojonegoro | 2013 | 16,02 | 2,37 | 1.029.500 | 5,81 |
| Kab. Bojonegoro | 2014 | 15,48 | 2,29 | 1.140.000 | 3,21 |
| Kab. Bojonegoro | 2015 | 15,71 | 17,42 | 1.311.000 | 5,01 |
| Kab. Tuban | 2012 | 17,84 | 6,29 | 970.000 | 4,13 |
| Kab. Tuban | 2013 | 17,23 | 5,85 | 1.144.400 | 4,3 |
| Kab. Tuban | 2014 | 16,64 | 5,47 | 1.370.000 | 3,63 |
| Kab. Tuban | 2015 | 17,08 | 4,89 | 1.575.500 | 3,03 |
| Kab. Lamongan | 2012 | 16,7 | 6,92 | 950.000 | 4,75 |
| Kab. Lamongan | 2013 | 16,18 | 6,93 | 1.075.700 | 4,93 |
| Kab. Lamongan | 2014 | 15,68 | 6,30 | 1.220.000 | 4,3 |
| Kab. Lamongan | 2015 | 15,38 | 5,77 | 1.410.000 | 4,1 |
| Kab. Gresik | 2012 | 14,35 | 6,92 | 1.257.000 | 6,78 |
| Kab. Gresik | 2013 | 13,94 | 6,05 | 1.740.000 | 4,55 |
| Kab. Gresik | 2014 | 13,41 | 7,04 | 2.195.000 | 5,06 |
| Kab. Gresik | 2015 | 13,63 | 6,58 | 2.707.500 | 5,67 |
| Kab. Bangkalan | 2012 | 24,7 | (1,42) | 885.000 | 5,13 |
| Kab. Bangkalan | 2013 | 23,23 | 0,19 | 983.800 | 6,78 |
| Kab. Bangkalan | 2014 | 22,38 | 7,19 | 1.102.000 | 5,68 |
| Kab. Bangkalan | 2015 | 22,57 | (2,66) | 1.267.300 | 5 |
| Kab. Sampang | 2012 | 27,97 | 5,77 | 800.000 | 1,71 |
| Kab. Sampang | 2013 | 27,08 | 6,53 | 1.104.600 | 4,68 |
| Kab. Sampang | 2014 | 25,8 | 0,08 | 1.120.000 | 2,22 |
| Kab. Sampang | 2015 | 25,69 | 2,08 | 1.243.200 | 2,51 |
| Kab. Pamekasan | 2012 | 19,61 | 6,25 | 975.000 | 2,29 |
| Kab. Pamekasan | 2013 | 18,53 | 6,10 | 1.059.600 | 2,17 |
| Kab. Pamekasan | 2014 | 17,74 | 5,62 | 1.090.000 | 2,14 |
| Kab. Pamekasan | 2015 | 17,41 | 5,32 | 1.209.900 | 4,26 |
| Kab. Sumenep | 2012 | 21,96 | 9,96 | 825.000 | 1,14 |
| Kab. Sumenep | 2013 | 21,22 | 14,45 | 965.000 | 2,56 |
| Kab. Sumenep | 2014 | 20,49 | 6,23 | 1.090.000 | 1,01 |
| Kab. Sumenep | 2015 | 20,2 | 1,27 | 1.253.500 | 2,07 |
| Kota Kediri | 2012 | 8,14 | 5,27 | 1.037.500 | 8,12 |
| Kota Kediri | 2013 | 8,23 | 3,52 | 1.128.400 | 7,92 |
| Kota Kediri | 2014 | 7,95 | 5,85 | 1.165.000 | 7,66 |
| Kota Kediri | 2015 | 8,51 | 5,36 | 1.339.750 | 8,46 |

| | | | | | |
|------------------|------|-------|------|-----------|------|
| Kota Blitar | 2012 | 6,75 | 6,52 | 815.000 | 3,68 |
| Kota Blitar | 2013 | 7,42 | 6,49 | 924.800 | 6,17 |
| Kota Blitar | 2014 | 7,15 | 5,88 | 1.000.000 | 5,71 |
| Kota Blitar | 2015 | 7,29 | 5,68 | 1.250.000 | 3,8 |
| Kota Malang | 2012 | 5,21 | 6,26 | 1.132.254 | 7,96 |
| Kota Malang | 2013 | 4,87 | 6,20 | 1.340.300 | 7,73 |
| Kota Malang | 2014 | 4,8 | 5,80 | 1.587.000 | 7,22 |
| Kota Malang | 2015 | 4,6 | 5,61 | 1.882.250 | 7,28 |
| Kota Probolinggo | 2012 | 10,92 | 6,49 | 885.000 | 5,26 |
| Kota Probolinggo | 2013 | 8,55 | 6,47 | 1.103.200 | 4,48 |
| Kota Probolinggo | 2014 | 8,37 | 5,93 | 1.250.000 | 5,16 |
| Kota Probolinggo | 2015 | 8,17 | 5,86 | 1.437.500 | 4,01 |
| Kota Pasuruan | 2012 | 7,9 | 6,31 | 975.000 | 4,54 |
| Kota Pasuruan | 2013 | 7,6 | 6,51 | 1.195.800 | 5,41 |
| Kota Pasuruan | 2014 | 7,34 | 5,71 | 1.360.000 | 6,09 |
| Kota Pasuruan | 2015 | 7,47 | 5,52 | 1.575.000 | 5,57 |
| Kota Mojokerto | 2012 | 6,48 | 6,09 | 875.000 | 7,52 |
| Kota Mojokerto | 2013 | 6,65 | 6,20 | 1.040.000 | 5,73 |
| Kota Mojokerto | 2014 | 6,42 | 5,83 | 1.250.000 | 4,42 |
| Kota Mojokerto | 2015 | 6,16 | 5,74 | 1.437.500 | 4,88 |
| Kota Madiun | 2012 | 5,37 | 6,83 | 812.500 | 6,89 |
| Kota Madiun | 2013 | 5,02 | 7,68 | 953.000 | 6,57 |
| Kota Madiun | 2014 | 4,86 | 6,62 | 1.066.000 | 6,93 |
| Kota Madiun | 2015 | 4,89 | 6,15 | 1.250.000 | 5,1 |
| Kota Surabaya | 2012 | 6,25 | 7,35 | 1.257.000 | 5,27 |
| Kota Surabaya | 2013 | 6 | 7,58 | 1.740.000 | 5,32 |
| Kota Surabaya | 2014 | 5,79 | 6,96 | 2.200.000 | 5,82 |
| Kota Surabaya | 2015 | 5,82 | 5,97 | 2.710.000 | 7,01 |
| Kota Batu | 2012 | 4,47 | 7,26 | 1.100.215 | 3,51 |
| Kota Batu | 2013 | 4,77 | 7,29 | 1.268.000 | 2,3 |
| Kota Batu | 2014 | 4,59 | 6,90 | 1.580.037 | 2,43 |
| Kota Batu | 2015 | 4,71 | 6,69 | 1.817.000 | 4,29 |

Lampiran B. Rekapitulasi Perubahan Data

| kabupaten/ kota | tahun | Y | LOG_X1 | LOG_X2 | X3 |
|------------------|-------|-------|------------|-----------|------|
| Kab. Pacitan | 2012 | 17,29 | 0,80151309 | 5,8750613 | 1,02 |
| Kab. Pacitan | 2013 | 16,73 | 0,76894191 | 5,948046 | 0,99 |
| Kab. Pacitan | 2014 | 16,18 | 0,71641758 | 6 | 1,08 |
| Kab. Pacitan | 2015 | 16,68 | 0,70718085 | 6,0606978 | 0,97 |
| Kab. Ponorogo | 2012 | 11,76 | 0,77651901 | 5,8721563 | 3,14 |
| Kab. Ponorogo | 2013 | 11,92 | 0,71106936 | 5,965672 | 3,25 |
| Kab. Ponorogo | 2014 | 11,53 | 0,71692503 | 6 | 3,66 |
| Kab. Ponorogo | 2015 | 11,91 | 0,72046742 | 6,0606978 | 3,68 |
| Kab. Trenggalek | 2012 | 14,21 | 0,79348447 | 5,8808136 | 2,98 |
| Kab. Trenggalek | 2013 | 13,56 | 0,77785223 | 5,9561204 | 4,04 |
| Kab. Trenggalek | 2014 | 13,1 | 0,72295794 | 6 | 4,2 |
| Kab. Trenggalek | 2015 | 13,39 | 0,70171947 | 6,0606978 | 2,46 |
| Kab. Tulungagung | 2012 | 9,4 | 0,81060911 | 5,9111576 | 3,1 |
| Kab. Tulungagung | 2013 | 9,07 | 0,787707 | 6,0034174 | 2,71 |
| Kab. Tulungagung | 2014 | 8,75 | 0,73716472 | 6,0441476 | 2,42 |
| Kab. Tulungagung | 2015 | 8,57 | 0,69820961 | 6,1048455 | 3,95 |
| Kab. Blitar | 2012 | 10,74 | 0,74970142 | 5,9138139 | 2,82 |
| Kab. Blitar | 2013 | 10,57 | 0,70379017 | 5,9762812 | 3,64 |
| Kab. Blitar | 2014 | 10,22 | 0,70104181 | 6 | 3,08 |
| Kab. Blitar | 2015 | 9,97 | 0,70300199 | 6,1003705 | 2,79 |
| Kab. Kediri | 2012 | 13,71 | 0,78634063 | 5,9995655 | 4,08 |
| Kab. Kediri | 2013 | 13,23 | 0,76487609 | 6,0374066 | 4,65 |
| Kab. Kediri | 2014 | 12,77 | 0,72601597 | 6,0549959 | 4,91 |
| Kab. Kediri | 2015 | 12,91 | 0,68867946 | 6,1156937 | 5,02 |
| Kab. Malang | 2012 | 11,04 | 0,83054778 | 6,0532706 | 3,75 |
| Kab. Malang | 2013 | 11,48 | 0,72439282 | 6,1283023 | 5,17 |
| Kab. Malang | 2014 | 11,07 | 0,77879295 | 6,2135178 | 4,83 |
| Kab. Malang | 2015 | 11,53 | 0,72149591 | 6,292699 | 4,95 |
| Kab. Lumajang | 2012 | 12,4 | 0,77831181 | 5,9166597 | 4,6 |
| Kab. Lumajang | 2013 | 12,14 | 0,74683791 | 6,0051591 | 2,01 |
| Kab. Lumajang | 2014 | 11,75 | 0,7261915 | 6,049218 | 2,83 |
| Kab. Lumajang | 2015 | 11,52 | 0,6647695 | 6,1099159 | 2,6 |
| Kab. Jember | 2012 | 11,81 | 0,76591433 | 5,9637878 | 3,77 |
| Kab. Jember | 2013 | 11,68 | 0,78230388 | 6,0382028 | 3,94 |
| Kab. Jember | 2014 | 11,28 | 0,79280087 | 6,1038037 | 4,64 |

| | | | | | |
|------------------|------|-------|------------|-----------|------|
| Kab. Jember | 2015 | 11,22 | 0,72939964 | 6,1645016 | 4,77 |
| Kab. Banyuwangi | 2012 | 9,97 | 0,86000507 | 5,9614211 | 3,41 |
| Kab. Banyuwangi | 2013 | 9,61 | 0,82661553 | 6,0359898 | 4,65 |
| Kab. Banyuwangi | 2014 | 9,29 | 0,75726953 | 6,0934217 | 7,17 |
| Kab. Banyuwangi | 2015 | 9,17 | 0,77881554 | 6,1541195 | 2,55 |
| Kab. Bondowoso | 2012 | 15,81 | 0,78484641 | 5,90309 | 3,6 |
| Kab. Bondowoso | 2013 | 15,29 | 0,76410161 | 5,9758911 | 2,04 |
| Kab. Bondowoso | 2014 | 14,76 | 0,70348212 | 6,0433623 | 3,72 |
| Kab. Bondowoso | 2015 | 14,96 | 0,69452794 | 6,1040601 | 1,75 |
| Kab. Situbondo | 2012 | 14,34 | #NUM! | 5,904445 | 3,33 |
| Kab. Situbondo | 2013 | 13,65 | 0,79140874 | 6,0203613 | 3,01 |
| Kab. Situbondo | 2014 | 13,15 | 0,76264778 | 6,0297895 | 4,15 |
| Kab. Situbondo | 2015 | 13,63 | 0,68687402 | 6,0904873 | 3,57 |
| Kab. Probolinggo | 2012 | 22,22 | 0,80868876 | 5,9469433 | 1,92 |
| Kab. Probolinggo | 2013 | 21,21 | 0,71173493 | 6,0786743 | 3,3 |
| Kab. Probolinggo | 2014 | 20,44 | 0,69052636 | 6,1315385 | 1,47 |
| Kab. Probolinggo | 2015 | 20,82 | 0,67737603 | 6,1922328 | 2,51 |
| Kab. Pasuruan | 2012 | 11,58 | 0,8750728 | 6,0976043 | 6,38 |
| Kab. Pasuruan | 2013 | 11,26 | 0,84201032 | 6,2355284 | 4,34 |
| Kab. Pasuruan | 2014 | 10,86 | 0,82895469 | 6,3404441 | 4,43 |
| Kab. Pasuruan | 2015 | 10,72 | 0,73084571 | 6,4313638 | 6,41 |
| Kab. Sidoarjo | 2012 | 6,44 | 0,86092837 | 6,0976043 | 5,37 |
| Kab. Sidoarjo | 2013 | 6,72 | 0,83844997 | 6,2355284 | 4,12 |
| Kab. Sidoarjo | 2014 | 6,4 | 0,80903981 | 6,3404441 | 3,88 |
| Kab. Sidoarjo | 2015 | 6,44 | 0,71944361 | 6,4321673 | 6,3 |
| Kab. Mojokerto | 2012 | 10,71 | 0,86068004 | 6,0913152 | 3,35 |
| Kab. Mojokerto | 2013 | 10,99 | 0,81683553 | 6,2304489 | 3,16 |
| Kab. Mojokerto | 2014 | 10,56 | 0,80953677 | 6,3117539 | 3,81 |
| Kab. Mojokerto | 2015 | 10,57 | 0,75166683 | 6,4305588 | 4,05 |
| Kab. Jombang | 2012 | 12,23 | 0,82773952 | 5,9904277 | 6,72 |
| Kab. Jombang | 2013 | 11,17 | 0,77315689 | 6,0791812 | 5,59 |
| Kab. Jombang | 2014 | 10,8 | 0,73417807 | 6,1760913 | 4,39 |
| Kab. Jombang | 2015 | 10,79 | 0,72874985 | 6,2367891 | 6,11 |
| Kab. Nganjuk | 2012 | 13,22 | 0,76729113 | 5,8948697 | 4,09 |
| Kab. Nganjuk | 2013 | 13,6 | 0,73213036 | 5,9823617 | 4,73 |
| Kab. Nganjuk | 2014 | 13,14 | 0,70797754 | 6,0534626 | 3,93 |
| Kab. Nganjuk | 2015 | 12,69 | 0,71426916 | 6,1020905 | 2,1 |

| | | | | | |
|-----------------|------|-------|------------|-----------|------|
| Kab. Madiun | 2012 | 13,7 | 0,25763384 | 5,8893017 | 3,99 |
| Kab. Madiun | 2013 | 12,45 | 0,75392316 | 5,9826104 | 4,63 |
| Kab. Madiun | 2014 | 12,04 | 0,72760112 | 6,0191163 | 3,38 |
| Kab. Madiun | 2015 | 12,54 | 0,72120796 | 6,0798141 | 6,99 |
| Kab. Magetan | 2012 | 11,5 | 0,76274382 | 5,8750613 | 3,64 |
| Kab. Magetan | 2013 | 12,19 | 0,76732018 | 5,9376432 | 2,96 |
| Kab. Magetan | 2014 | 11,8 | 0,70728955 | 6 | 4,28 |
| Kab. Magetan | 2015 | 11,35 | 0,71358775 | 6,0606978 | 6,05 |
| Kab. Ngawi | 2012 | 15,99 | 0,82149178 | 5,8920946 | 2,94 |
| Kab. Ngawi | 2013 | 15,45 | 0,73999034 | 5,9542425 | 4,97 |
| Kab. Ngawi | 2014 | 14,88 | 0,7645748 | 6,0170333 | 5,61 |
| Kab. Ngawi | 2015 | 15,61 | 0,70546749 | 6,0777312 | 3,99 |
| Kab. Bojonegoro | 2012 | 16,66 | 0,57621197 | 5,9684829 | 3,42 |
| Kab. Bojonegoro | 2013 | 16,02 | 0,37449573 | 6,0126264 | 5,81 |
| Kab. Bojonegoro | 2014 | 15,48 | 0,36051396 | 6,0569049 | 3,21 |
| Kab. Bojonegoro | 2015 | 15,71 | 1,24113291 | 6,1176027 | 5,01 |
| Kab. Tuban | 2012 | 17,84 | 0,79845051 | 5,9867717 | 4,13 |
| Kab. Tuban | 2013 | 17,23 | 0,76744661 | 6,0585778 | 4,3 |
| Kab. Tuban | 2014 | 16,64 | 0,73772077 | 6,1367206 | 3,63 |
| Kab. Tuban | 2015 | 17,08 | 0,689103 | 6,1974184 | 3,03 |
| Kab. Lamongan | 2012 | 16,7 | 0,84041449 | 5,9777236 | 4,75 |
| Kab. Lamongan | 2013 | 16,18 | 0,84063359 | 6,0316912 | 4,93 |
| Kab. Lamongan | 2014 | 15,68 | 0,79955777 | 6,0863598 | 4,3 |
| Kab. Lamongan | 2015 | 15,38 | 0,76101018 | 6,1492191 | 4,1 |
| Kab. Gresik | 2012 | 14,35 | 0,83985757 | 6,0993353 | 6,78 |
| Kab. Gresik | 2013 | 13,94 | 0,78141874 | 6,2405492 | 4,55 |
| Kab. Gresik | 2014 | 13,41 | 0,8476834 | 6,3414345 | 5,06 |
| Kab. Gresik | 2015 | 13,63 | 0,81835481 | 6,4325685 | 5,67 |
| Kab. Bangkalan | 2012 | 24,7 | #NUM! | 5,9469433 | 5,13 |
| Kab. Bangkalan | 2013 | 23,23 | -0,7273668 | 5,9929068 | 6,78 |
| Kab. Bangkalan | 2014 | 22,38 | 0,85677824 | 6,0421816 | 5,68 |
| Kab. Bangkalan | 2015 | 22,57 | #NUM! | 6,1028794 | 5 |
| Kab. Sampang | 2012 | 27,97 | 0,76147283 | 5,90309 | 1,71 |
| Kab. Sampang | 2013 | 27,08 | 0,81516804 | 6,043205 | 4,68 |
| Kab. Sampang | 2014 | 25,8 | -1,1063067 | 6,049218 | 2,22 |
| Kab. Sampang | 2015 | 25,69 | 0,31740894 | 6,094541 | 2,51 |
| Kab. Pamekasan | 2012 | 19,61 | 0,79612546 | 5,9890046 | 2,29 |

| | | | | | |
|------------------|------|-------|------------|-----------|------|
| Kab. Pamekasan | 2013 | 18,53 | 0,7850285 | 6,0251419 | 2,17 |
| Kab. Pamekasan | 2014 | 17,74 | 0,75002572 | 6,0374265 | 2,14 |
| Kab. Pamekasan | 2015 | 17,41 | 0,72598744 | 6,0827495 | 4,26 |
| Kab. Sumenep | 2012 | 21,96 | 0,99829894 | 5,9164539 | 1,14 |
| Kab. Sumenep | 2013 | 21,22 | 1,15995418 | 5,9845273 | 2,56 |
| Kab. Sumenep | 2014 | 20,49 | 0,79421639 | 6,0374265 | 1,01 |
| Kab. Sumenep | 2015 | 20,2 | 0,1053032 | 6,0981243 | 2,07 |
| Kota Kediri | 2012 | 8,14 | 0,722077 | 6,0159881 | 8,12 |
| Kota Kediri | 2013 | 8,23 | 0,54646152 | 6,0524631 | 7,92 |
| Kota Kediri | 2014 | 7,95 | 0,76689306 | 6,0663259 | 7,66 |
| Kota Kediri | 2015 | 8,51 | 0,72936564 | 6,1270238 | 8,46 |
| Kota Blitar | 2012 | 6,75 | 0,8144587 | 5,9111576 | 3,68 |
| Kota Blitar | 2013 | 7,42 | 0,81254368 | 5,9660478 | 6,17 |
| Kota Blitar | 2014 | 7,15 | 0,76965187 | 6 | 5,71 |
| Kota Blitar | 2015 | 7,29 | 0,75435403 | 6,09691 | 3,8 |
| Kota Malang | 2012 | 5,21 | 0,79637963 | 6,0539439 | 7,96 |
| Kota Malang | 2013 | 4,87 | 0,79238111 | 6,127202 | 7,73 |
| Kota Malang | 2014 | 4,8 | 0,76327509 | 6,2005769 | 7,22 |
| Kota Malang | 2015 | 4,6 | 0,74873759 | 6,2746773 | 7,28 |
| Kota Probolinggo | 2012 | 10,92 | 0,81201091 | 5,9469433 | 5,26 |
| Kota Probolinggo | 2013 | 8,55 | 0,81087905 | 6,0426543 | 4,48 |
| Kota Probolinggo | 2014 | 8,37 | 0,77312891 | 6,09691 | 5,16 |
| Kota Probolinggo | 2015 | 8,17 | 0,76784158 | 6,1576079 | 4,01 |
| Kota Pasuruan | 2012 | 7,9 | 0,80011032 | 5,9890046 | 4,54 |
| Kota Pasuruan | 2013 | 7,6 | 0,81385571 | 6,0776585 | 5,41 |
| Kota Pasuruan | 2014 | 7,34 | 0,75629718 | 6,1335389 | 6,09 |
| Kota Pasuruan | 2015 | 7,47 | 0,7423119 | 6,1972806 | 5,57 |
| Kota Mojokerto | 2012 | 6,48 | 0,78465099 | 5,9420081 | 7,52 |
| Kota Mojokerto | 2013 | 6,65 | 0,79255685 | 6,0170333 | 5,73 |
| Kota Mojokerto | 2014 | 6,42 | 0,76558791 | 6,09691 | 4,42 |
| Kota Mojokerto | 2015 | 6,16 | 0,75918834 | 6,1576079 | 4,88 |
| Kota Madiun | 2012 | 5,37 | 0,8341587 | 5,9098234 | 6,89 |
| Kota Madiun | 2013 | 5,02 | 0,88551169 | 5,9790929 | 6,57 |
| Kota Madiun | 2014 | 4,86 | 0,82089282 | 6,0277572 | 6,93 |
| Kota Madiun | 2015 | 4,89 | 0,78908257 | 6,09691 | 5,1 |
| Kota Surabaya | 2012 | 6,25 | 0,8663001 | 6,0993353 | 5,27 |
| Kota Surabaya | 2013 | 6 | 0,87975493 | 6,2405492 | 5,32 |

| | | | | | |
|---------------|------|------|------------|-----------|------|
| Kota Surabaya | 2014 | 5,79 | 0,8423424 | 6,3424227 | 5,82 |
| Kota Surabaya | 2015 | 5,82 | 0,77603444 | 6,4329693 | 7,01 |
| Kota Batu | 2012 | 4,47 | 0,86069892 | 6,0414776 | 3,51 |
| Kota Batu | 2013 | 4,77 | 0,86286665 | 6,1031193 | 2,3 |
| Kota Batu | 2014 | 4,59 | 0,83901908 | 6,1986673 | 2,43 |
| Kota Batu | 2015 | 4,71 | 0,82567332 | 6,2593549 | 4,29 |



Lampiran C. Statistik Deskriptif

| | | | | |
|------|-------------|----------|-----------|-----------|
| MIN | 4,47 | -5,19286 | 745000 | 0,97 |
| MAX | 27,97 | 17,4234 | 2710000 | 8,46 |
| MEAN | 12,43289474 | 5,696651 | 1233758,2 | 4,2867763 |



Lampiran D. Analisa Data

Uji Chow → Hasil = Model *Fixed Effect*

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|------------|----------|--------|
| Cross-section F | 376.926083 | (37,108) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 725.413945 | 37 | 0.0000 |

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/08/18 Time: 19:13

Sample: 2012 2015

Periods included: 4

Cross-sections included: 38

Total panel (unbalanced) observations: 149

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| C | 31.54765 | 2.642845 | 11.93700 | 0.0000 |
| X1 | 0.125793 | 0.079982 | 1.572761 | 0.1187 |
| X2 | -1.399244 | 0.187247 | -7.472730 | 0.0000 |
| X3 | 0.018057 | 0.041489 | 0.435219 | 0.6643 |
| R-squared | 0.353770 | Mean dependent var | | 12.26973 |
| Adjusted R-squared | 0.340400 | S.D. dependent var | | 5.028270 |
| S.E. of regression | 4.083748 | Akaike info criterion | | 5.678386 |
| Sum squared resid | 2418.165 | Schwarz criterion | | 5.759029 |
| Log likelihood | -419.0398 | Hannan-Quinn criter. | | 5.711150 |
| F-statistic | 26.45946 | Durbin-Watson stat | | 0.506385 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

Lampiran E. Uji Haussman → Hasil = Model *Fixed Effect*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 64.263700 | 3 | 0.0000 |

Cross-section random effects test comparisons:

| Variable | Fixed | Random | Var(Diff.) | Prob. |
|----------|-----------|-----------|------------|--------|
| X1 | 0.125793 | 0.097658 | 0.000022 | 0.0000 |
| X2 | -1.399244 | -1.444805 | 0.000228 | 0.0026 |
| X3 | 0.018057 | -0.005174 | 0.000024 | 0.0000 |

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 03/08/18 Time: 19:13

Sample: 2012 2015

Periods included: 4

Cross-sections included: 38

Total panel (unbalanced) observations: 149

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 59.02520 | 16.82749 | 3.507666 | 0.0006 |
| X1 | -2.920269 | 0.640650 | -4.558294 | 0.0000 |
| X2 | -2.592853 | 1.218748 | -2.127473 | 0.0351 |
| X3 | -1.292503 | 0.206359 | -6.263364 | 0.0000 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.995034 | Mean dependent var | 12.26973 |
| Adjusted R-squared | 0.993195 | S.D. dependent var | 5.028270 |
| S.E. of regression | 0.414800 | Akaike info criterion | 1.306481 |
| Sum squared resid | 18.58239 | Schwarz criterion | 2.133070 |
| Log likelihood | -56.33280 | Hannan-Quinn criter. | 1.642310 |
| F-statistic | 541.0023 | Durbin-Watson stat | 1.771506 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Lampiran F. Hasil Regresi *Fixed Effect*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/08/18 Time: 19:18
 Sample: 2012 2015
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 38
 Total panel (unbalanced) observations: 149

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 59.02520 | 16.82749 | 3.507666 | 0.0006 |
| X1 | -2.920269 | 0.640650 | -4.558294 | 0.0000 |
| X2 | -2.592853 | 1.218748 | -2.127473 | 0.0351 |
| X3 | 1.292503 | 0.206359 | 6.263364 | 0.0000 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.995034 | Mean dependent var | 12.26973 |
| Adjusted R-squared | 0.993195 | S.D. dependent var | 5.028270 |
| S.E. of regression | 0.414800 | Akaike info criterion | 1.306481 |
| Sum squared resid | 18.58239 | Schwarz criterion | 2.133070 |
| Log likelihood | -56.33280 | Hannan-Quinn criter. | 1.642310 |
| F-statistic | 541.0023 | Durbin-Watson stat | 1.771506 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Uji Asumsi Klasik

Lampiran G. Uji Autokorelasi

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/08/18 Time: 19:18
 Sample: 2012 2015
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 38
 Total panel (unbalanced) observations: 149

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 59.02520 | 16.82749 | 3.507666 | 0.0006 |
| X1 | -2.920269 | 0.640650 | -4.558294 | 0.0000 |
| X2 | -2.592853 | 1.218748 | -2.127473 | 0.0351 |
| X3 | -1.292503 | 0.206359 | -6.263364 | 0.0000 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| R-squared | 0.995034 | Mean dependent var | 12.26973 |
| Adjusted R-squared | 0.993195 | S.D. dependent var | 5.028270 |
| S.E. of regression | 0.414800 | Akaike info criterion | 1.306481 |
| Sum squared resid | 18.58239 | Schwarz criterion | 2.133070 |
| Log likelihood | -56.33280 | Hannan-Quinn criter. | 1.642310 |
| F-statistic | 541.0023 | Durbin-Watson stat | 1.771506 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

$n = 4$ th x 38 kab/kota = 152 sampel $k = 3$

$dL = 1,6948$ $dU = 1,752$ $4 - dL = 2,3052$ $4 - dU = 2,248$

Lampiran H. Uji Multikolinearitas

| | X1 | X2 | X3 |
|----|----------|----------|----------|
| X1 | 1.000000 | 0.056418 | 0.051613 |
| X2 | 0.056418 | 1.000000 | 0.257667 |
| X3 | 0.051613 | 0.257667 | 1.000000 |



Lampiran I. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: REABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/08/18 Time: 19:25
 Sample: 2012 2015
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 38
 Total panel (unbalanced) observations: 149

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| C | 7.677855 | 11.31939 | 0.678292 | 0.4987 |
| X1 | -0.340903 | 0.430948 | -0.791055 | 0.4302 |
| X2 | -0.215775 | 0.819819 | -0.263198 | 0.7928 |
| X3 | -0.192637 | 0.138812 | -1.387754 | 0.1673 |
| R-squared | 0.021017 | Mean dependent var | | 3.256364 |
| Adjusted R-squared | 0.000762 | S.D. dependent var | | 2.748074 |
| S.E. of regression | 2.747026 | Akaike info criterion | | 4.885394 |
| Sum squared resid | 1094.192 | Schwarz criterion | | 4.966037 |
| Log likelihood | -359.9618 | Hannan-Quinn criter. | | 4.918158 |
| F-statistic | 1.037637 | Durbin-Watson stat | | 0.658015 |
| Prob(F-statistic) | 0.377876 | | | |

Lampiran J. Estimasi Individual Effect pada Fixed Effect Model

| | CROSSID | Effect |
|----|------------------|-----------|
| 1 | Kab. Pacitan | -37049.67 |
| 2 | Kab. Ponorogo | -27089.09 |
| 3 | Kab. Trenggalek | -36043.68 |
| 4 | Kab. Tulungagung | -37347.27 |
| 5 | Kab. Blitar | -10175.04 |
| 6 | Kab. Kediri | 74674.60 |
| 7 | Kab. Malang | 159803.3 |
| 8 | Kab. Lumajang | -5343.131 |
| 9 | Kab. Jember | 147667.3 |
| 10 | Kab. Banyuwangi | 23659.26 |
| 11 | Kab. Bondowoso | -13304.84 |
| 12 | Kab. Situbondo | -37590.85 |
| 13 | Kab. Probolinggo | 112839.5 |
| 14 | Kab. Pasuruan | 51424.90 |
| 15 | Kab. Sidoarjo | 12489.45 |
| 16 | Kab. Mojokerto | -8168.426 |
| 17 | Kab. Jombang | 12753.03 |
| 18 | Kab. Nganjuk | 8155.322 |
| 19 | Kab. Madiun | -43068.65 |
| 20 | Kab. Magetan | -55898.26 |
| 21 | Kab. Ngawi | -942.3165 |
| 22 | Kab. Bojonegoro | 69048.21 |
| 23 | Kab. Tuban | 70617.21 |
| 24 | Kab. Lamongan | 62451.67 |
| 25 | Kab. Gresik | 48701.71 |
| 26 | Kab. Bangkalan | 88435.51 |
| 27 | Kab. Sampang | 118760.7 |
| 28 | Kab. Pamekasan | 24978.59 |
| 29 | Kab. Sumenep | 95311.58 |
| 30 | Kota Kediri | -104472.5 |
| 31 | Kota Blitar | -119029.3 |
| 32 | Kota Malang | -83968.62 |
| 33 | Kota Probolinggo | -106903.1 |
| 34 | Kota Pasuruan | -111725.9 |
| 35 | Kota Mojokerto | -119428.5 |
| 36 | Kota Madiun | -120047.3 |
| 37 | Kota Surabaya | 46523.62 |
| 38 | Kota Batu | -115879.0 |

